

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, AKUNTABILITAS DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Empiris pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Iqbal Fakhoironi

1905046040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Iqbal Fakhoironi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Iqbal Fakhoironi

NIM : 1905046040

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.

NIP. 197912222015032001

Siti Nurgaini, S.Sos.I., M.Si.

NIP. 198312012015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Iqbal Fakhoironi
NIM : 1905046040
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal :

29 April 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 29 April 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Tri Widvastuti Ningsih, M.Ak.
NIP. 198710102019032017

Penguji Utama I

Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026

Pembimbing I

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
NIP. 197912222015032001

Sekretaris Sidang

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
NIP. 197912222015032001

Penguji Utama II

Farah Amalia, S.E., M.M.
NIP. 199401182019032026

Pembimbing II

Siti Nurhaini, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198312012015032004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-58/Un.10.5/D.1/PP.00.9/III/2023

21 Maret 2023

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Desy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Iqbal Fakhoironi
NIM : 1905046040
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam
Pengelolaan Dana Desa

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Siti Nurngaini, M.Si
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Vakil Dekan Bidang Akademik.

NURYATONI

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ah. Sholeh dan Ibu Maryatun yang telah sepenuh hati membesarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Serta bertekad kuat untuk mendukung dan mendoakan disetiap langkah saya, termasuk dalam menjalani perkuliahan hingga sampai selesai.
2. Saudara perempuan saya, Nailly Rahmawati yang telah memberikan semangat dan juga arahan dalam menjalani segala aktivitas yang saya lakukan.
3. Dosen pembimbing saya, Dessy Noor Farida, SE., M.Si.,Akt, dan Siti Nurngani, S.Sos.I.,M.Si, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan bantuan, saran, arahan dalam penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh dosen dan guru saya yang telah berjasa begitu besar dalam mendidik saya, atas bimbingan, do'a dan support nya sehingga bisa berada dititik ini.
5. Keluarga besar PMII Rayon Ekonomi, HMJ Akuntansi Syariah, UKM Ebi Sport, KMPP Semarang, yang sudah kebersamai dan menjadi tempat berproses selama di bangku perkuliahan.
6. Teman-teman Prodi Akuntansi Syariah 2019 yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
7. Teman-teman seperjuangan yakni FEBI 2019 terimakasih telah menjadi keluarga dan teman seperjuangan selama di bangku perkuliahan.
8. Teman-teman KKN Reguler 79 Posko 20 yang telah kebersamai selama 45 hari.
9. Teman-teman disekitar rumah yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
10. Kepada seluruh pihak yang belum bisa saya sebutkan, saya ucapkan terimakasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan menaruh kerendahan hati serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”** tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 28 Desember 2023

Deklarator,



Iqbal Fakhoironi
NIM. 1905046040

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang krusial dalam skripsi. Sebab pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis dengan alfabet Arab wajib disalin kedalam alfabet latin. Guna menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ش = z	ق = q
ب = b	ض = s	ك = k
خ = t	غ = sy	ه = l
ز = ts	ص = sh	م = m
ض = j	ذ = dl	ن = n
غ = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ح = h
د = d	ع = _	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ز = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اَي = ay

اَو = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ al-thibb.

E. Kata Sandang (ال)

Kata sandang (ال) ditulis dengan al-..... misalnya الصناعة = al-shina’ah.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta’Marbuthah (ّ)

Setiap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = alma‘‘isyah al-thabi‘‘iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi aparatur, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner (angket). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability sampling* dengan sampel jenuh dan diperoleh sampel penelitian berjumlah 48 responden atau pihak pengelola dana desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Responden tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa. Analisis data menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik t, uji statistik f, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci : Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine how apparatus competence, accountability and internal control systems affect fraud prevention in the management of village funds. This type of research is quantitative research using primary data obtained from respondents through a questionnaire (questionnaire). Determination of the sample in this study using Non Probability sampling technique with saturated sample and obtained a research sample of 48 respondents or village fund managers in Sukolilo District, Pati Regency. The respondents included the Village Head, Village Secretary and Village Finance Clerk. Data analysis uses multiple linear regression analysis tools and classical assumption tests consisting of normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests. Hypothesis testing is done with t statistical test, f statistical test, and coefficient of determination (R^2). The results of this study indicate that the apparatus competency variable has no effect and is insignificant to fraud prevention in the management of village funds, Accountability has a positive and significant effect on fraud prevention in the management of village funds. And the internal control system has a negative and significant effect on fraud prevention in the management of village funds.

Keywords : **Apparatus Competence, Accountability, Internal Control System, *Fraud* Prevention in Village Fund Management**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Puji dan syukur bagi Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk sebagai umat beliau yang diakui dan diberikan syafaat di yaumul akhir nanti.

Setelah menempuh berbagai proses tahapan yang cukup panjang, dengan ridha dan kemurahan Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada program Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sangat dalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Warno, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah dan Naili Sa’adah, S.E., M.Si, Akt, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dessy Noor Farida, SE., M.Si.,Akt, selaku dosen pembimbing I dan Siti Nurngaini, S.Sos.I.,M.Si, selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Pemerintah Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do’a.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Terimakasih atas segala doa dan dukunganya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebajikannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 28 Desember 2023



Iqbal Fakhoironi

NIM. 1905046040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori <i>Fraud Triangle</i>	10
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	11
2.1.3 Kompetensi Aparatur	11
2.1.4 Akuntabilitas	14

2.1.5	Sistem Pengendalian Internal	17
2.1.6	Pencegahan <i>Fraud</i>	21
2.1.7	Pengelolaan Dana Desa.....	27
2.2	Penelitian Terdahulu.....	29
2.3	Kerangka Pemikiran	37
2.4	Hipotesis	37
2.4.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	37
2.4.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	38
2.4.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Jenis Penelitian dan Sumber Data	41
3.1.1	Jenis Penelitian.....	41
3.1.2	Sumber Data.....	41
3.2	Populasi dan Sampel.....	41
3.2.1	Populasi	41
3.2.2	Sampel.....	42
3.3	Metode Pengumpulan Data	42
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	42
3.5	Teknik Analisis Data	44
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2	Uji Instrumen.....	45
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	45
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Uji <i>Pilot Test</i>	49
4.2	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50

4.3	Gambaran Umum Responden Penelitian.....	53
4.3.1	Karakteristik Responden	53
4.4	Hasil Penelitian.....	56
4.4.1	Statistik Deskriptif.....	56
4.4.2	Uji Kualitas Data.....	57
4.4.3	Uji Asumsi Klasik	60
4.4.4	Pengujian Hipotesis.....	64
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
4.5.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	70
4.5.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	71
4.5.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	73
BAB V	PENUTUP.....	75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan Penelitian	75
5.3	Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	82
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Uji <i>Pilot Test</i> Variabel Kompetensi Aparatur	49
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Pilot Test</i> Variabel Akuntabilitas	49
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Pilot Test</i> Variabel Sistem Pengendalian Internal	50
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Pilot Test</i> Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	50
Tabel 4.5 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	51
Tabel 4.6 Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Menurut Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.....	52
Tabel 4.7 Analisis Tingkat Pengemabalian Kuesioner	53
Tabel 4.8 Karakteristik Respoonden Berdasarkan Usia.....	54
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	55
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	55
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif	56
Tabel 4.13 Validitas Variabel Kompetensi Aparatur	58
Tabel 4.14 Validitas Variabel Akuntabilitas	58
Tabel 4.15 Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	59
Tabel 4.16 Validitas Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	59
Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas	60
Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov	61
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolenieritas.....	62
Tabel 4.20 Hasil Uji Glejser.....	64
Tabel 4.21 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 4.22 Hasil Uji T.....	66
Tabel 4.23 Hasil Uji Simultan (F).....	68
Tabel 4.24 Hasil Uji Determinasi (R^2).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022	2
Gambar 2. 1 Teori <i>Fraud Triangle</i>	10
Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	51
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	61
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastiditas.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	82
Lampiran 2 Surat Perizinan Penelitian	88
Lampiran 3 Lampiran Dokumentasi Data	91
Lampiran 4 Lampiran Tabulasi Data	96
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas pada Pilot Test	101
Lampiran 6 Statistik Deskriptif	105
Lampiran 7 Uji Kualitas Data	107
Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik.....	117
Lampiran 9 Uji Hipotesis	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan salah satu sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedia pada pemerintah desa. Dana desa diharapkan tidak hanya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan desa, melaksanakan pengelolaan desa dan mengatasi kemiskinan yang ada di daerah masing-masing.¹ Dana desa disebut sebagai anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana desa menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat untuk pembangunan yang berkaitan dengan desa, diantaranya yaitu sebagai pembangunan jalan, pembangunan jembatan yang bertujuan untuk menghubungkan antar desa dan untuk keperluan yang lainnya.

Undang-Undang Desa menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat untuk kesejahteraan. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana dengan tujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang dikelola oleh kepala pemerintah untuk mengalokasikan Dana desa yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN. Dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan pertanggungjawabannya atas keuangan desa tersebut. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPD), Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD, dan Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas dan fungsi dari kebendaharaanya. Pemberian Dana Desa yang sangat besar akan dapat memunculkan resiko yang tinggi akan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.² Undang-undang

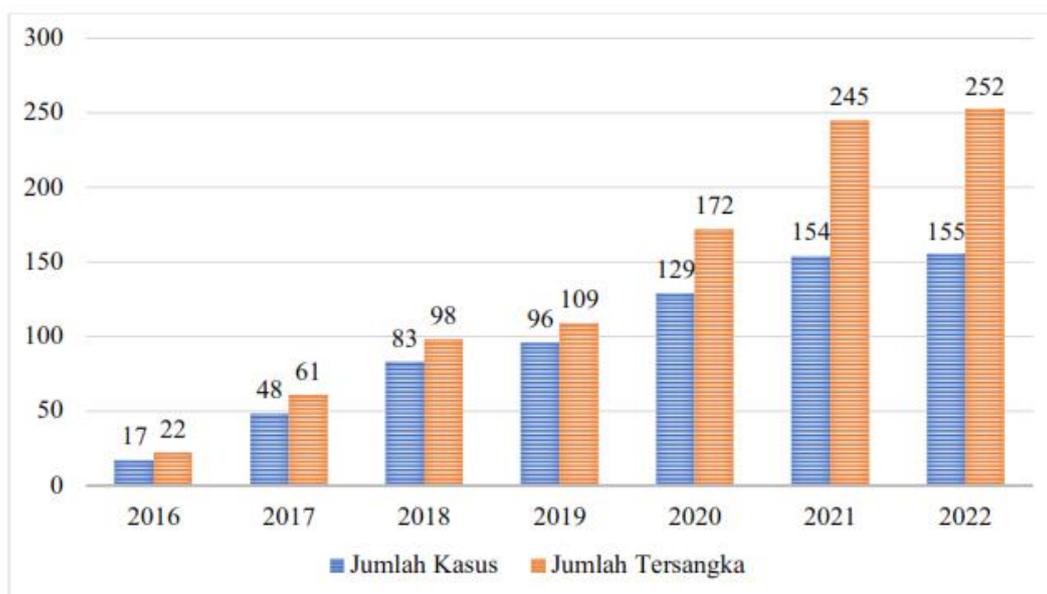
¹ Lianita Puspita Dewi, "Pengaruh Aparatur, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan , Klaten)" 0832, no. September (2022): 327–340.

² Ni Putu Agustina Widyawati, Edy Sujana, and Gede Adi Yuniarta, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing Sistem, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 3 (2019): 368–379.

Desa juga menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit sepuluh persen (10%) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi alokasi khusus yang digunakan untuk mendanai penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan desa. Dana yang dialokasikan disetiap daerah berbeda-beda, karena didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah dari desa tersebut. Tata cara pembagian dana desa juga akan berbeda-beda, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah masing-masing. Keberadaan dana desa saat ini rentan sekali dengan adanya potensi kecurangan (*fraud*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya memuat berbagai tata cara pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban. Selain itu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengharuskan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan inklusif serta anggaran yang terkendali dan disiplin. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik, kepala desa harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas, salah satu petunjuknya adalah tanggung jawab.³

Gambar 1. 1
Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022



Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022

³ Natalia Lily Babulu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan *Fraud*," *Juni 5*, no. 2 (2020): 18–26, <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP18>.

Setelah tujuh tahun berlalu sejak 2016, kabar buruknya tahun 2023 ternyata ada dan memprihatinkan. Ratusan kepala desa terjerat kasus korupsi. Dana desa yang mengucur tiap tahun ini, ternyata telah diselewengkan oleh sejumlah oknum kepala desa dan sebagian oknum aparatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 orang pelaku. Sepatu atau 50 persen di antara pelaku itu adalah kepala desa itu sendiri. Dari segi jumlah, angka 400-an oknum kepala desa dari 70.000-an kepala desa di seluruh Indonesia yang harus berhadapan dengan hukum, memang masih kecil. Namun tetap memprihatinkan. Kasus korupsi ini dikhawatirkan akan terus menggurita sepanjang waktu. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tren korupsi di perdesaan meningkat sejak adanya program Dana Desa. Hal ini disampaikan ICW dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. Menurut catatan ICW, pada 2016 baru ada 17 kasus korupsi di sektor desa. Kemudian pada 2022 jumlahnya melonjak jadi 155 kasus. Tak hanya dari jumlah kasus, nilai potensi kerugian negara dari korupsi desa juga meningkat drastis. Pada 2016 potensinya baru sekitar Rp40,1 miliar, lantas pada 2022 membengkak jadi Rp381 miliar seperti terlihat pada grafik. Adapun dari seluruh kasus korupsi desa yang terpantau ICW, tidak semuanya berkaitan dengan program Dana Desa. Ada pula korupsi yang terkait penerimaan atau pendapatan desa. Fenomena yang terjadi pada Kepala Desa (Kades) Kedungmulyo, Sukolilo, Kabupaten Pati. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 107,4 juta.⁴ Dari berbagai fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi di kantor pusat tetapi juga terjadi di pemerintahan daerah termasuk desa. Dengan tingginya tingkat korupsi yang ada, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil, jujur dan secara sistematis.

Pencegahan *fraud* dilakukan pemerintah salah satunya dengan cara melalui pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi No. 13 Tahun 2006, memastikan kepastian sanksi bagi pelapor tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan pencegahan penyelewengan terkait pengelolaan dana desa dengan menyederhanakan pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga memperketat pengawasan pengelolaan dana desa.

⁴ Baihaqi Annizar, "Korupsi Dana Desa, Kades Kedungmulyo Pati Rugikan Negara Hingga Rp 107,4 Juta," *Jatengtoday.Com*, last modified 2019, <https://jatengtoday.com/korupsi-dana-desa-kades-kedungmulyo-pati-rugikan-negara-hingga-rp-1074-juta>.

Kebijakan *anti-fraud* pemerintah tidak cukup untuk memecahkan masalah tindak pidana korupsi.⁵

Menurut Spencer dan Spencer dalam Philep Njonjie et al., Kompetensi merupakan landasan dasar dari karakteristik seseorang dan menentukan bagaimana berperilaku, berpikir, menyesuaikan diri dengan situasi, dan dukungan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kompetensi adalah sesuatu yang ditampilkan seseorang di tempat kerja setiap hari. Ketika peralatan dilengkapi dengan keterampilan yang baik, kemungkinan kecurangan bisa dihindari.⁶

Kecurangan (*Fraud*) menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2013, menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan pengguna tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.⁷ Kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih sangat tinggi, maka diperlukan suatu cara untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa tersebut, selain juga perlu optimalisasi dari partisipasi masyarakat, dan suatu bentuk antisipasi untuk mencegah kasus serupa terjadi Pencegahan *fraud* adalah upaya yang dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*.

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur. Kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah, karena kompetensi inilah yang akan menjadi acuan dalam melakukan pengalokasikan dana desa yang dimana kompetensi yang dimiliki aparatur desa tersebut akan menjadi peran besar dalam setiap tindakan dilakukan dan juga berperan besar atas keputusan yang akan diambil oleh pemerintah kompetensi aparatur harus sama-sama bersinergi agar dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya *fraud*.⁸ Pengelolaan dana

⁵ Kivaayatul Akhyaar et al., "PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SISTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA," *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 202–217.

⁶ Philep Njonjie et al., "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara" (2014): 79–88.

⁷ Memen Kustiawan, "PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN" XX, no. 03 (2016): 345–362.

⁸ Wahyu Ramadhan and Fefri Indra Arza, "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 3, no. 4 (2021): 822–835, <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>.

desa membutuhkan kompetensi dari seorang aparatur yang profesional dan memenuhi kriteria, sehingga sosial ekonomi desa bisa tercapai.

Peran perangkat desa merupakan merupakan sebuah peran yang dimiliki aparatur agar dapat membantu Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam pemerintahan desa dan berkontribusi penuh untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Pernyataan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perihal mengelola dana Desa, Pemimpin desa melakukan pembentukan PTPKD (Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa) ini adalah sebagian dari unsur perangkat desa. Dengan ini perangkat desa memiliki andil pada rancangan dana desa ini telah sesuai dengan aturan yang telah disahkan maka terbentuklah akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal juga berfungsi dalam terbentuknya pengelolaan dana desa yang memuaskan ini juga berhubungan teori institusional yang dimana teori ini menjelaskan tentang berprilaku pada sebuah kelembagaan atau organisasi.⁹

Sebagai pelaku pemerintahan, Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat terkait apa yang sudah dilakukannya yaitu dalam rangka menjalankan tugas, dan wewenang, serta kewajiban Pemerintah Daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan Dana Desa antara lain dikarenakan akuntabilitas yang rendah. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat berguna bagi setiap entitas pemerintahan, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, dan akuntabilitas tersebut menjadi bagian penting dari pemerintahan, karena akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas apa yang diyakini masyarakat. Badan publik melihat ini sebagai isu penting yang harus ditangani oleh pemerintah, karena tanggung jawab ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam segala hal yang dilakukan pemerintah.¹⁰ Akuntabilitas mempunyai peran yang penting sekali di dalam Pemerintahan Desa yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada desa itu sendiri serta bisa menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan *fraud* adalah suatu upaya untuk menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud*. Upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala oleh seluruh anggota organisasi dengan tujuan untuk meyakinkan organisasi tersebut telah mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal adalah proses penting dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan semua karyawan secara berkelanjutan untuk memberikan jaminan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

yang wajar untuk pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset pemerintah. dan kepatuhan. dengan memastikan hukum. dan aturan undangan. Sesuai PP No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP adalah: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.¹¹

Sistem pengendalian internal disebut juga dengan kontrol intern yang mana tahapannya mempengaruhi sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan yang tujuannya membantu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan. Pengendalian internal adalah alat untuk memantau, mengukur, dan mengendalikan sumber daya dalam organisasi. Sistem ini berperan penting dalam mendeteksi penipuan, mencegahnya, dan melindungi sumber daya organisasi, baik berwujud (seperti tanah dan mesin) maupun tidak berwujud (seperti kekayaan intelektual seperti merek atau reputasi). Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan tindakan yang terkoordinasi dalam memelihara kekayaan perusahaan, mengendalikan keakuratan dan keunggulan informasi akuntansi dan mendorong efisiensi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Marwah Yusuf et al., dengan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.¹³ Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Vidya Vitta Adhivinna, Alfi Prastika Agustin menjelaskan bahwasannya kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Sariwati, Ni Komang Sumadi dengan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sama artinya dengan akuntabilitas dibutuhkan untuk mencegah segala kecurangan di pemerintahan desa dalam mengelola dana desa.¹⁵ Sedangkan, penelitian

¹¹ Sri Ayem and Kirana Feby Kusumasari, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi” 10, no. 2 (2020): 160–169.

¹² Marwah Yusuf et al., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah),” *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2021): 1–12.

¹³ Ibid.

¹⁴ Alfi Prastika Agustin Vidya Vitta Adhivinna, “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 25–35.

¹⁵ Ni Wayan Sariwati and Ni Komang Sumadi, “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 279–291.

yang dilakukan oleh Deni Ramadani, Dien Noviany R, menjelaskan bahwasannya akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Santi Putri Laksmi, I Ketut Sujana dengan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin memadai sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁷ Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahayu et al., menjelaskan bahwasannya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil dan dijadikan perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
- 2) Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
- 3) Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

¹⁶ Dien Noviany R Deni Ramadani, “Pengaruh Praktek Akuntabilitas , Moralitas Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *JABKO : jurnal akuntansi bisnis kontemporeransi dan bisnis kontemporer* 1, no. 2 (2021): 96–107.

¹⁷ Santi Putri Laksmi and I Ketut Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *E-Jurnal Akuntansi* 26 (2019): 2155.

¹⁸ Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, and Devi Narulitasari, “Determinan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa,” *Among Makarti* 11, no. 2 (2019): 97–107.

- 2) Menguji secara empiris akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- 3) Menguji secara empiris sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian *fraud* dalam pengelolaan dana desa ataupun sejenisnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya tentang *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

- 2) Manfaat Praktis

Bagi aparaturnya desa atau masyarakat diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi untuk kompetensi aparaturnya, akuntabilitasnya, dan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan , dan Bab V Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang berisi skripsi mengenai variabel dan hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta metode analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan tentang penelitian berupa gambaran umum, obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan responden, serta teknik analisis data (statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis).

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

BAB II

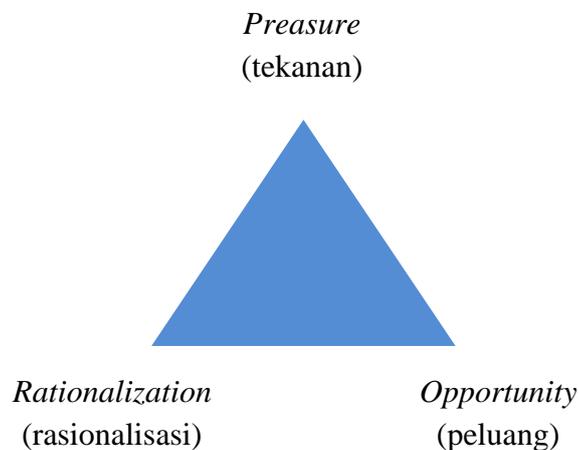
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1970) yang memaparkan bahwa terdapat tiga penyebab atau pemicu *fraud* yaitu :

Gambar 2. 1
Teori *Fraud Triangle*



Menurut Donald R. Cressey dalam Laila Nur Rahimah dkk, mengemukakan 3 (tiga) faktor yang melatarbelakangi tindakan kecurangan, diantaranya *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Ketiga faktor tersebut dikenal juga dengan *fraud triangle* dalam istilah akuntansi. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang biasa muncul berupa tekanan yang dapat berujung pada kecurangan: kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, dan tujuan keuangan. Kemudian *opportunity* adalah suatu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menyembunyikan perilaku tidak jujur. *Rationalization* terjadi ketika pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan setelah melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat menerima perbuatan melawan hukumnya demi menjaga identitasnya sebagai orang yang dapat

dipercaya, namun setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi tersebut dihapus karena tidak diperlukan lagi.¹⁹

2.1.2 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* adalah suatu pandangan baru tentang bagaimana mengelola organisasi dengan baik. Bagaimana cara membangun suatu perilaku dimana seseorang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan kemampuan pribadinya, tetapi juga mereka harus dapat lebih bertanggung jawab secara kelompok atau bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasinya. Biasanya teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintahan, karena teori ini tidak berpacu kepada laba namun tetapi lebih berpacu terhadap pelayanan masyarakat yang baik sebagai prinsipalnya. Asumsi filosofi dari teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yaitu, dapat dipercaya, berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuatnya, dan memiliki sifat yang jujur.²⁰

Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah bertanggung jawab dan akuntabel untuk bertindak sesuai dengan amanah dan fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dengan mengubah cara penyajian laporan keuangan secara transparan. Pemerintah sebagai pelayan atau pengelola harus melaporkan secara jelas, rinci dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Hal ini bukan hanya merupakan persoalan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dana desa, namun juga kepatuhan pemerintah terhadap peraturan hukum. Untuk menjalankan akuntabilitas, masyarakat berhak memberikan masukan atau komentar terhadap pengambilan keputusan untuk pembangunan di masa depan.

2.1.3 Kompetensi Aparatur

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Aparatur

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk

¹⁹ Shanti Lysandra Laila Nur Rahimah, Yetty murni, "PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN Dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi Dan Desa Gunungjaya Kecamatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 06, no. 48 (2018): 139–154, <https://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/226>.

²⁰ Kadek Wiwin Indah Aprilia and Ni Wayan Yuniasih, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangandes," *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2021): 25–45, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1521>.

mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan.²¹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan menjelaskan kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur sipil negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.²²

Aparatur desa merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dimensi peningkatan kompetensi perangkat desa meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pembelajaran dan pengalaman. Tiga tingkat kompetensi yang harus dimiliki perangkat desa, yaitu sebagai berikut :

1) Keterampilan dasar

Keterampilan dasar yang harus dimiliki perangkat desa antara lain: pengetahuan tentang peraturan desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.

2) Kemampuan manajemen

Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen layanan publik, manajemen aset, dan manajemen keuangan.

3) Kemampuan teknis

Kemampuan teknis meliputi: penyiapan administrasi desa, penyiapan rencana pembangunan, penyiapan anggaran, penyiapan peraturan desa, dan pelayanan publik.²³

²¹ Lara El Mouallem and Farhad Analoui, "The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study From the Middle East (Lebanon)," *European Scientific Journal* 1, no. June (2014): 245–254.

²² Taufeni Taufik and Azwir Nasir, "Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi THE INFLUENCE OF VILLAGE APARATURE COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SISTEM AND WHISTLEBLOWING SISTEM ON FRAUD PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT WITH INDIVIDUAL MORALITY AS MODERATED VARIABELS (STUDY IN VILLAGES IN BENGKALIS DI," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 227–237, <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.

²³ Asrori, "Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus," *Jurnal Bina Praja* 06, no. 02 (2014): 101–116.

2.1.3.2 Kompetensi Aparatur dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif islam telah dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat An – Nisa' ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya :

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat dalam Al-Qur'an di atas memerintahkan kepada kaum mukmin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakannya ; wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya, yakni yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya yakni Muhammad SAW. Dalam ayat diatas juga di sebutkan ulil amri. Ulil amri merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan menangani urusan kamu. Dalam hal ini adalah pemerintah desa. Pemerintah desa dituntut agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan relevan. Pemerintahan harus mampu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa.

2.1.3.3 Indikator Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur adalah kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlakukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan. Kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada situasi tertentu. Kompetensi sendiri terdapat 3 indikator :

1) Pengetahuan

Informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks, Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.

2) Perilaku

Tingkah laku dan nilai – nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

3) Keahlian

Kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Menurut Supriyono dalam Wahyu Ramadhan, Fefri Indra Arza. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal, baik yang menyangkut fiskal manajerial maupun program. Akuntabilitas merupakan sebuah pengedali penuh aparat atas segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga tugas pemerintah sebagai penyalur adalah hal yang perlu ada dalam hal mempertanggungjawabkan segala macam kegiatan dari pemerintah kepada masyarakat.²⁴

Pandangan Mardiasmo dalam Melisa Eka et al., ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas. Pertama, adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. Kedua, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.²⁵

Akuntabilitas keuangan memiliki fokus utama pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

2.1.4.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :



²⁴ Ramadhan and Arza, "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa."

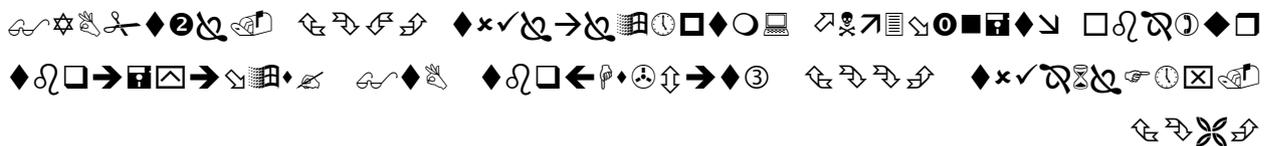
²⁵ Sari, Melisa Eka, Fefri Indra Arza, and Salma Taqwa., "PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1443–1457, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/154/113>.



Artinya :

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Dan terdapat juga firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat Al-Infitar ayat 10-12 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya :

- 10. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu),
- 11. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
- 12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat dalam Al Quran di atas adalah sebagian dari banyak perintah Allah dalam agama Islam kepada manusia untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dalam setiap tindakannya. Islam adalah agama yang sangat mengutamakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban.²⁶

2.1.4.3 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah pengendali penuh aparat atas segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga tugas pemerintah sebagai penyalur adalah hal yang perlu ada dalam hal mempertanggungjawabkan segala macam kegiatan dari pemerintah kepada masyarakat. adapun indikator Akuntabilitas menurut Ni Made Suryani adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan

²⁶ Dwiyani Sudaryanti, "Akuntansi Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi Di Indonesia," *Tera Ilmu Akuntansi* 10, no. 1 (2011): 58-76.

- 3) Penatausahaan
- 4) Pelaporan
- 5) Pertanggungjawaban

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

2.1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa Pengendalian Internal adalah rangkaian tindakan dan kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern merupakan semua proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pimpinan dalam menciptakan tata kelola yang baik.²⁷

Menurut Mulyadi dalam dalam Bhima Azis Usman et al., sistem pengendalian internal adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Ini berarti sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam pelaksanaan pemerintahan. Semua perusahaan harus memanfaatkan suatu sistem untuk mengatur aktivitas operasional agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Dengan memanfaatkan sistem pengendalian yang efektif, perusahaan dapat mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*).²⁸

²⁷ Taufik and Nasir, "Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi THE INFLUENCE OF VILLAGE APARATURE COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SISTEM AND WHISTLEBLOWING SISTEM ON *FRAUD* PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT WITH INDIVIDUAL MORALITY AS MODERATED VARIABELS (STUDY IN VILLAGES IN BENGKALIS DI."

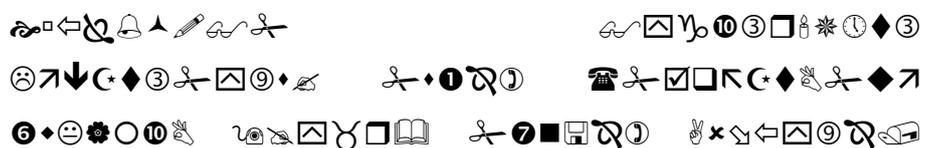
²⁸ Bhima Azis Usman, Taufeni Taufik, and M. Rasuli, "PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (STUDI PADA SKPD

Sistem pengendalian intern di sektor pemerintahan yang disebut juga dengan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan di semua tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kota. Komponen sistem pengendalian internal, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.²⁹

Pengendalian internal adalah kerangka peraturan dan sistem yang menjamin perlindungan aset yang tersedia bagi suatu perusahaan. Sistem kebijakan dan prosedur pengendalian internal pemerintah yang baik dapat melindungi aset perusahaan dan sumber daya lain yang dibutuhkan organisasi untuk beroperasi secara efisien dan efektif.³⁰ Sistem pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai sasaran, kekurangan aktivitas pengawasan pada risiko yang terjadi dalam proses bisnis dan kompleksitas organisasi yang dapat diatasi dengan kebijakan dan prosedur. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya penipuan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama karena keuangan desa diawasi oleh pihak yang berwenang. Semakin kuat sistem pengawasan internal yang ada di Pemerintahan Desa, maka tindakan penipuan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalkan dan dicegah. Namun, jika pengawasan internal lemah, maka tindakan penipuan yang terjadi semakin besar dan dampak kerugiannya juga besar.

2.1.5.2 Sistem Pengendalian Internal dalam Perpektif Islam

Sistem pengendalian internal ditegaskan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR),” *JURNAL EKONOMI* 23, no. 4 (2015): 18–34, <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/5830>.

²⁹ Gharin Eka Ferdianti and Hero Priono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon,” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 11, no. 2 (2022): 28.

³⁰ Firda Idzdiana, Ratno Agriyanto, and Firdha Rahmiyanti, “Research Paper THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES CAPABILITIES , APPLICATION OF SYSTEMS OF INTERNAL CONTROL , AND THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY REPORT,” *Global Financial Accounting Journal* 07, no. 01 (2023): 1–13, <https://journal.uib.ac.id/index.php/gfa%0ATHE>.

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat dalam Al-Qur'an di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat islam untuk berhati-hati dalam praktik muamalah dan menerapkan sistem pengendalian internal atas transaksi tersebut. Misalnya, hutang harus dicatat dan dibuktikan oleh berbagai saksi. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan di kemudian hari, Anda akan memiliki bukti yang jelas untuk menjamin keadilan.

2.1.5.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah rangkaian tindakan dan kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Committee of Sponsoring Organizations (2013:4) menjelaskan terdapat lima indikator yang terdapat dalam sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

2.1.6 Pencegahan *Fraud*

2.1.6.1 Pengertian *Fraud*

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 mengatakan bahwa *fraud* merupakan sebuah tindakan yang mengandung niat atau unsur kesengajaan, yang mana dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lainnya. Penipuan, manipulasi atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara ilegal yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa yang dilakukan oleh seorang atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai

atau pihak ketiga. Kecurangan merupakan upaya memanipulasi yang secara sengaja dilakukan untuk mencuri harta atau hak dari pihak lain.³¹

Kecurangan adalah penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Penipuan yang tidak adil atau memberikan informasi palsu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan pihak lain.³² Menurut Eliza dalam Marwah Yusuf et al., kecurangan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain. Dalam konteks audit keuangan, kecurangan diartikan sebagai manipulasi laporan keuangan. Tindakan kecurangan dapat berupa tindakan korupsi.³³

Menurut Tuanakotta dalam Faridatul Islamiyah et al., definisi *fraud* adalah penyalahgunaan wewenang atau pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu. Contohnya penjualan aset negara secara tidak sah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, pengadaan *kickbacks* dalam sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” dana-dana pemerintah.³⁴

Pencegahan *fraud* merupakan sebuah upaya yang integrasi yang dilakukan untuk menekan terjadinya faktor pemicu *fraud*, yaitu memperkecil peluang akan terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai-pegawai agar dapat memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau rasionalisasi *fraud* yang dilakukan. Kecurangan (*fraud*) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan, yang akan menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan tersebut. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk

³¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I), “Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,” *Jakarta* (2017): 1–85.

³² Ayem and Kusumasari, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi.”

³³ Yusuf et al., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah).”

³⁴ Faridatul Islamiyah, Anwar Made, and Ati Retna Sari, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 1–13, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/4452>.

memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.³⁵

2.1.6.2 Jenis-jenis *Fraud*

Menurut Tuanakotta dalam Yulina Eliza, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut :

- 1) *Corruption* (korupsi) dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukan pengertian korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut ACFE korupsi terbagi sebagai berikut :
 - a. Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana lainnya.
 - b. Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan/ permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
 - c. Pemberian ilegal (*illegal gravity*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atas pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi atau kesepakatan bisnis.
 - d. Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap

³⁵ Marwah Yusuf et al., "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah)," *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2021): 1–12.

(*bribery fraud*). Penjual menawarkan untuk memberi suap/hadiah pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:

- a. Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.

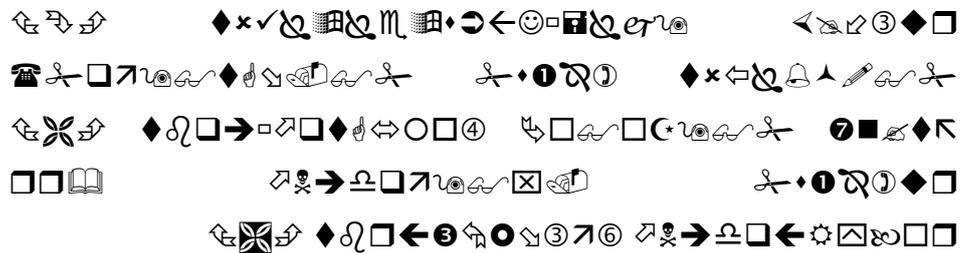
3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*) Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- a. *Timing difference*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi yang sebenarnya.
- b. *Fictitious revenues*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictive*).
- c. *Concealed liabilities and expenses*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.

d. *Improper disclosure*, yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan.³⁶

2.1.6.3 *Fraud* dalam Perspektif Islam

Kecurangan atau *Fraud* ditegaskan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut :



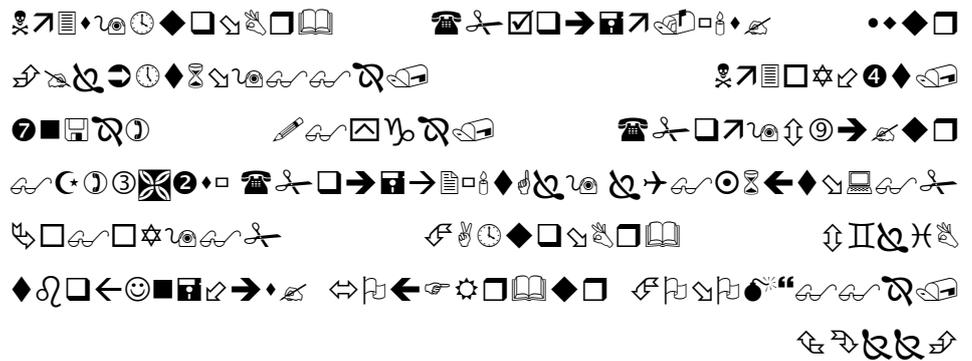
Artinya :

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Ayat dalam Al-Qur'an di atas, ditafsirkan oleh hadist riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah yaitu Ibnu Abbas menceritakan sesampainya Rasulullah di kota Madinah, masyarakat disana dikenal selalu melakukan kecurangan pada takaran. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.³⁷

Islam dengan tegas memerintahkan umatnya agar untuk bermuamalah antar sesama manusia, yaitu dengan keadilan dan keridhaan. Salah satu bentuknya ialah dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Yang ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi sebagai berikut :

³⁶ Yulina Eliza and Sekolah, "Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang)," *Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2015): 86–100.
³⁷ Safuan, Ismartaya, and Budiandru., "*Fraud* Dalam Perspektif Islam," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 219–228.



Artinya :

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Ibnu Abi Talhah telah meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang ayat ini yaitu terkait seseorang pria yang mempunyai hutang berupa harta, sedangkan pemiutang (yang meminjamkan) tidak memegang bukti kuat. kemudian pria itu mengingkari hutangnya dan mengadukan hal ini kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang benar, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan telah memakan harta haram.³⁸

2.1.6.4 Indikator Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menekan faktor penyebab *fraud* dengan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan yang terjadi dalam mengelola keuangan desa. Variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini diwakili oleh 7 item pertanyaan. Menurut Laksmi dan Sujana (2019) terdapat 4 indikator untuk pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan anti *fraud*
- 2) Prosedur

³⁸ Ibid.

- 3) Teknik pengendalian
- 4) Kepekaan terhadap *fraud*

2.1.7 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa disebut sebagai anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana desa menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat untuk pembangunan yang berkaitan dengan desa, diantaranya yaitu sebagai pembangunan jalan, pembangunan jembatan yang bertujuan untuk menghubungkan antar desa dan untuk keperluan lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi :

- 1) Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 2) Pendapatan dan belanja.
- 3) Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli desa, swadya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan dan lain-lain.
- 4) Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa mempunyai ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Mengingat terbatasnya jumlah dana yang harus dikelola serta jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa perlu dibuat sesederhana mungkin tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.³⁹

Prinsip penggunaan dana desa adalah keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya serta tipologi desa. pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang

³⁹ Didit Herlianto, *MANAJEMEN KEUANGAN DESA*, ed. Andy Gp and Tim Gosyen (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017).

harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa tersebut adalah transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib disiplin dan anggaran.⁴⁰

Dalam pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang mana dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.⁴¹

2.1.7.1 Sumber-sumber Pendapatan Desa

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menyebutkan mengenai sumber pendapatan desa. Desa mempunyai anggaran yang terdiri atas pendapatan asli desa, pembagian pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, sebagian dana pembangunan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah Kabupaten/Kota, dan alokasi anggaran dari pendapatan daerah negara dan adanya sumber pendapatan bagi desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah tidak mengikat dan sumbangan pihak ketiga.⁴²

2.1.7.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

⁴⁰ Sari, Melisa Eka, Fefri Indra Arza, and Salma Taqwa., "PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA."

⁴¹ Rusmianto Yuliansyah, *Akuntansi Desa*, ed. Denny Susanto (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), <http://www.penerbitsalemba.com>.

⁴² S. STP.M.Si. Muhamad Mu'iz Raharjo, *PENGLOLAAN DANA DESA*, ed. Tarmizi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021).

2.1.7.3 Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dana desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan kepada masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik desa (BUMDES).

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian yang telah dipilih, yaitu sebagai berikut :

NO	PENULIS	JUDUL	TEORI	HASIL	PERBEDAAN
1.	Vidya Vitta Adhivinna,	Kompetensi Aparatur dan	- <i>Agency Theory</i> - <i>GONE Theory</i>	1. Kompetensi aparatur tidak	- Objek penelitian pada

	Mega Selawati Dan M. Sulkhanul Umam (2022)	Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa		berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	Pemerintahan Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. - Teknik pemilihan sampelnya adalah <i>purposive sampling</i>
2.	Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif dan Wahyu Anggit Prasetya (2022)	Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa	- Teori <i>Fraud Triangle</i>	1. Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. 2. Sistem <i>whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. 3. Sistem pengendalian	- Variabel Independen, yaitu Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan <i>Whistleblowing System</i> - Objek penelitian pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bansari Temanggung

				internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	
3.	Kadek Wiwin Indah Aprilia dan Ni Wayan Yuniasih (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa se-Kota Denpasar)	- Teori <i>Stewardship</i> - Teori perkembangan mohral	1. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dari Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 2. Moralitas Individu mempunyai pengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 3. Budaya Organisasi berpengaruh positif dari Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolan	- Variabel Independen, yaitu Moralitas Individu dan Budaya Organisasi - Objek penelitian pada Pemerintah Desa se-Kota Denpasar

				Keuangan Desa.	
4.	Marwah Yusuf, Aswar, Irmawati Ibrahim, dan Yusdhaniar (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa (Pada Pemerintah Desa se- Kecamatan Adonara Tengah)	- Teori perkembangan moral	<p>1. Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa pada Pemerintah Desa Se- kecamatan Adonara Tengah.</p> <p>2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa pada Pemerintah Desa Se- kecamatan Adonara Tengah.</p> <p>3. Moralitas Individu berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa pada Pemerintah Desa Se- kecamatan</p>	- Variabel Independen, yaitu Moralitas Individu - Objek Penelitian pada Pemerintah Desa se- Kecamatan Adonara Tengah

				Adonara Tengah.	
5.	Deni Ramadani dan Dien Noviany R (2021)	Pengaruh Praktek Akuntabilitas, Moralitas dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	-	1. Praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa dikecamatan songgom. 2. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa di kecamatan songgom. 3. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa di kecamatan songgom.	- Variabel Independen, yaitu Moralitas dan Penyajian Laporan Keuangan - Objek Penelitian pada Desa di Kecamatan Songgom
6.	Luh Sri Isa Dewi Jayanti dan Ketut Alit Suardana	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, <i>Whistleblowing</i>	- Teori keagenan	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh	- Variabel Independen, yaitu Moralitas dan <i>Whistleblowing</i>

	(2019)	dan SPI terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa		<p>positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.</p> <p>2. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.</p> <p>3. <i>Whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.</p> <p>4. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.</p>	- Penentuan sampel menggunakan metode total atau sensus
7.	Putu Santi Putri Laksmi dan I Ketut Sujana (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal	<p>- Teori kepatuhan (<i>compliance theory</i>)</p> <p>- Teori perkembangan</p>	1. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>	<p>- Variabel Independen, yaitu Moralitas</p> <p>- Objek penelitian pada Desa Dinas di Kota Denpasar</p>

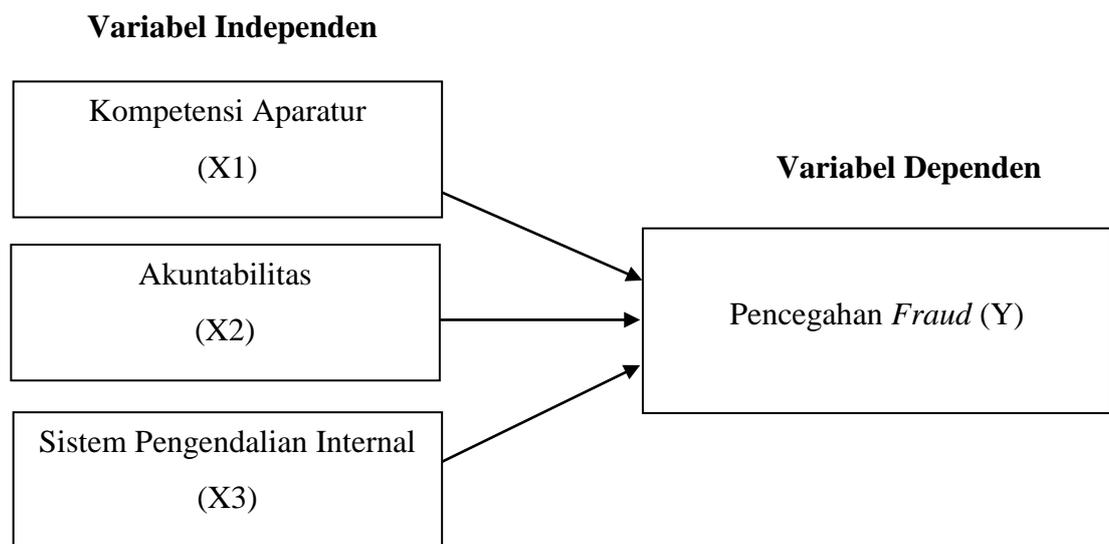
		Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa	moral	dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.	- Penentuan sampel menggunakan sampling total atau sensus
8.	Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitas ari, Ni Made Intan Prihandani dan I Gst. B. Ngr. P. Putra (2019)	Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	-	1. Akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 2. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.	- Objek penelitian pada pemerintah desa yang ada di Provinsi Bali. - Penentuan sampel menggunakan metode <i>purposive random sampling</i> .

9.	Putri Febriana dan Sarwenda Biduri (2022)	Effect of Village Financial Report Presentation, Internal Control, Individual Morality, and Competence on Fraud Prevention in Village Fund Allocation Management	- Teori Atribusi	<p>1. Penyajian Laporan Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p> <p>2. Internal Control Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p> <p>3. Moralitas Individu Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p> <p>4. Kompetensi Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana</p>	- Objek penelitian pada desa-desa di Kabupaten Sidoarjo.
----	---	--	------------------	--	--

				Desa.	
--	--	--	--	-------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Setiap aparatur pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Jika para pegawai pemerintah daerah memiliki kemampuan yang memadai, maka ini akan membuat perubahan dan peningkatan pada daerah tersebut. Kompetensi aparatur adalah aspek penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mencapai kinerja yang baik. Hal-hal pribadi seperti sifat, sikap, pengetahuan dan keterampilan sangat penting dalam kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur merupakan salah satu hal yang berguna dalam kompetensi. Seperti halnya pada teori *stewardship* dimana terosi tersebut

merupakan suatu pandangan baru mengenai bagaimana mengelola organisasi yang baik dan salah satunya dengan cara memberikan kompetensi kepada aparatur.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ramadhan, Fefri Indra Arza⁴³ yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa dan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Wiwin Indah Aprilia, Ni Wayan Yuniasih⁴⁴ yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahn *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dengan hasil kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban yang menerima amanahnya guna dipertanggungjawabkan baik berhasil maupun gagal pada yang memberikan amanah. Menurut saputra, dkk (2019) dinyatakan bahwa akuntabilitas memberi dampaknya terhadap pencegahan fraud dipengelolaan keuangan desa.

Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah bertanggung jawab dan akuntabel untuk bertindak sesuai dengan amanah dan fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dengan mengubah cara penyajian laporan keuangan secara transparan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem, Kirana Feby Kusumasari⁴⁵ yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi dan penelitian yang dilakukan oleh

⁴³ Ramadhan and Arza, "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa."

⁴⁴ Indah Aprilia and Yuniasih, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangandes." "

⁴⁵ Ayem and Kusumasari, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi."

Ni Wayan Sariwati Ni Komang Sumadi⁴⁶ yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa dengan hasil akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Sistem Pengendalian Internal merupakan hal yang bermanfaat, sebab adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan desa dan memberikan implikasi pada pengelolaan dan desa. Sistem Pengendalian Internal pada Aparatur Pemerintah Desa memberikan dampak positif pada pengelolaan dana desa.

Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah bertanggung jawab dan akuntabel untuk bertindak sesuai dengan amanah dan fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat. sistem pengendalian internal sangat berhubungan dengan teori *stewardship* yakni tujuan teori *stewardship* yang mengelola organisasi dengan baik yang salah satunya dengan cara pengendalian internal.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Santi Putri Laksmi, I Ketut Sujana⁴⁷ yang berjudul Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan penelitian yang dilakukan oleh Klara Wonar et al.,⁴⁸ yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi, dengan hasil kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

⁴⁶ Sariwati and Sumadi, "Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa."

⁴⁷ Laksmi and Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."

⁴⁸ CA Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah, SE., M.Si, Bill J.C Pangayow, SE., M.Si., Ak., "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DENGAN MORAL SENSITIVITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI" 1, no. 2 (2018): 63–89.

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan alat penelitian dan melakukan analisis data secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada peristiwa-peristiwa yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam kehidupan manusia yang disebut variabel. Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian terkait pengaruh variabel independen (bebas), yaitu kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen (terikat) yaitu Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.⁴⁹

3.1.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang digunakan berupa opini dari subyek penelitian yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode survei yaitu melalui penyebaran kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket). Sumber data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dari data yang disebarkan kepada responden.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik spesifik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya yang menjadi tujuan penelitian.⁵⁰ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemegang kekuasaan

⁴⁹ Sugiyono, "Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁵⁰ Sugiyono, *STATISTIKA UNTUK PENELITIAN*, ed. M. Pd Dra. Endang Mulyatiningsih, *Alfabeta Bandung*, vol. 12 (Bandung: CV ALFABETA, 2014).

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD, dan Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Populasi dalam penelitian ini, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa di 16 Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasi besar, peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁵¹ Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan sampel menggunakan sampling jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.⁵² Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan jumlah 48 responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner tersebut dibuat untuk menggali informasi terkait dengan pengaruh kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi aparatur, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks ini, variabel independen yang digunakan adalah kompetensi aparatur, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Adapun untuk variabel penelitian dan pengukurannya dapat dilihat sebagai berikut :

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kompetensi Aparatur (X1)	Keahlian dalam diri manusia untuk	1. Pengetahuan (knowledge)	Diukur melalui kuesioner dengan

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

	menyikapi situasi saat melakukan tanggung jawab pekerjaannya. ⁵³	2. Perilaku (attitude) 3. keahlian (skill). ⁵⁴	menggunakan skala linkert
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas merupakan sebuah pengendali penuh aparat atas segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga tugas pemerintah sebagai penyalur dalam hal mempertanggungjawabkan segala macam kegiatan dari pemerintah kepada masyarakat.	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban. ⁵⁵	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala linkert
Sistem Pengendalian Internal (X3)	Proses yang ditaksir, dilaksanakan, dan diadopsi oleh Pemerintah Desa yang mempunyai tujuan untuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, berdaya guna, penjagaan asset dan taat terhadap undang-undang. ⁵⁶	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal. ⁵⁷	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala linkert

⁵³ Laksmi and Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."

⁵⁴ Ni Made Suryani and Herkulanus Bambang Suprasto, "Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 8 (2021): 2011.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Laksmi and Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."

⁵⁷ Ibid.

Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	Suatu tindakan untuk menghilangkan atau menekan tindakan kecurangan itu terjadi dengan meningkatkan kualitas pengendalian internal yang baik, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan memberikan dukungan yang baik antar pekerja. ⁵⁸	1. Penetapan kebijakan <i>Anti—fraud</i> 2. Prosedur 3. Teknik pengendalian 4. Kepekaan terhadap <i>fraud</i> . ⁵⁹	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala linkert
---	--	--	---

Dalam mengukur jawaban responden pada kuisisioner pengaruh kompetensi aparatur akuntabilitas sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa menggunakan skala likert, maka jawaban akan diberi nilai atau bobot dengan tingkatan sebagai berikut :

- Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)
- Nilai 3 : Netral (N)
- Nilai 4 : Setuju (S)
- Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif ditujukan untuk menjelaskan distribusi atau sebaran data dari variabel-variabel yang digunakan

⁵⁸ Laila Nur Rahimah, Yetty murni, “PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN Dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi Dan Desa Gunungjaya Kecamatan.”

⁵⁹ Vidya Vitta Adhivinna, “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo.”

dalam penelitian. Deskripsi data dilakukan pada variabel-variabel yang akan diuji, terdiri dari variabel dependen (Y) yaitu Pencegahan *Fraud*, dan Variabel Independen (X) yaitu Pengaruh Kompetensi (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3).⁶⁰

3.5.2 Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran yang menandakan tingkat kevalidan (kebenaran) sesuai instrumen. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi, begitu juga sebaliknya instrument yang kurang valid mempunyai validitas rendah. Syarat minimum yang digunakan agar dianggap telah memenuhi syarat adalah $r_{hitung} \geq 0.3$ maka dinyatakan valid.⁶¹

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Realibilitas dilakukan dengan uji statistik/realibilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrument cukup dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Untuk menyatakan suatu variabel dikatakan realibel, jikalau alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur itu dinyatakan stabil, sehingga bisa diandalkan dan bisa diramalkan, agar bisa mencari reliabilitas instrumen yang skornya berupa skala bertingkat (rating scala) dapat pula menggunakan teknik *cronbach alpha*. Syarat minimum yang digunakan agar dapat dianggap memenuhi syarat adalah $\text{cronbach alpha} \geq 0.60$ maka dinyatakan di nyatakan realibel/andal.⁶²

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini peneliti menguji asumsi klasik yang terkait pada suatu persamaan model regresi, sehingga data yang digunakan dalam pengujian hipotesis tersebut dinyatakan bebas dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari :

⁶⁰ Sugiyono, "Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memakai kolmogarovsmirnov (K-S). Nilai signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak, hal ini mengartikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Nilai signifikan > 0.05 maka H_0 diterima, hal ini diartikan bahwa data berdistribusi normal.⁶³

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada-nya korelasi antar variabel bebas (dependen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terja- di korelasi diantara variabel independen. Apabila terdapat variabel independen yang saling berkorelasi, dapat dikatakan variabel tersebut tidak ortogonal. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari (a) nilai tolerance dan (b) VIF (Variante Inflation Factor). Dengan demikian, nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk melanjutkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.⁶⁴

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada ditemukan ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila model asumsi heteroskedastisitas tidak memenuhi, maka model regresi dikatakan tidak valid sebagai alat dalam peramalan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi yang baik ialah tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi itu terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Kriteria dalam pengujian ini terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikan < 0.05 dan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikan > 0.05 . Pengujian ini dilakukan agar dapat diketahui apakah semua variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.⁶⁵

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Sugiyono, *STATISTIKA UNTUK PENELITIAN*, vol. 12, p. .

⁶⁵ Sugiyono, "Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda. Analisis data ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Model regresi linear dalam parameter seperti persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi kompetensi aparatur

β_2 = Koefisien regresi akuntabilitas

β_3 = Koefisien regresi sistem pengendalian internal

X1 = Variabel kompetensi aparatur

X2 = Variabel akuntabilitas

X3 = Variabel sistem pengendalian internal

e = Variabel pengganggu (error)⁶⁶

3.5.4.2 Uji T

Pengujian koefisien secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Proses pengujian menggunakan uji T (t-test) dengan rumus :

$$t = \beta_i / (Se(\beta_i))$$

Dimana :

t = Nilai Hitung

β_i = Estimator

Se = Standar error of estimator

Uji t dikenal dengan uji parsial yakni untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebas (Independen) terhadap variabel terikatnya (dependen) yaitu apakah ada pengaruh kompetensi

⁶⁶ Ibid.

aparatur (X1), akuntabilitas (X2), dan sistem pengendalian internal (X3), secara parsial atau secara terpisah terhadap pemahaman pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y).⁶⁷

3.5.4.3 Uji Regresi Simultan (Uji-F)

Uji F dikenal dengan uji simultan yaitu untuk menguji apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen artinya apakah ada pengaruh kompetensi aparatur (X1), akuntabilitas (X2), dan sistem pengendalian internal (X3), secara simultan atau gabungan dari variabel independen terhadap Pemahaman pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y) variabel dependen.⁶⁸

3.5.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dalam penelitian dilihat dari nilai R^2 (nilai dari 0 sampai 1). Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Adapun syarat yang perlu dipenuhi agar kita bisa memaknai nilai koefisien determinasi merupakan hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda yang bernilai signifikan, yang berarti bahwa " ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y". Begitupun jika analisis dalam uji F ini tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh dari variabel X secara simultan terhadap variabel Y.⁶⁹

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Pilot Test

Pilot test digunakan untuk menguji validitas instrumen penelitian sebelum kuesioner disebarkan pada responden, maka kuesioner diuji coba terlebih dahulu kepada 20 responden secara random. Kriteria suatu nilai dapat dikatakan valid apabila nilai R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} . Pada pengujian ini diketahui bahwa $n = 20$ responden dan $alpha\ 0,05$ dengan rumus $df = n-2 = 18$ maka diketahui nilai R_{tabel} adalah 0,443. Nilai setiap item dapat dikatakan valid apabila lebih besar dari 0,443. Hasil uji *pilot test* dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Hasil Uji Pilot Test Variabel Kompetensi Aparatur

Variabel	Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Kompetensi Aparatur	X1.1	0,783	0,443	Valid
	X1.2	0,688	0,443	Valid
	X1.3	0,759	0,443	Valid
	X1.4	0,544	0,443	Valid
	X1.5	0,591	0,443	Valid
	X1.6	0,605	0,443	Valid

Tabel 4.2
Hasil Uji Pilot Test Variabel Akuntabilitas

Variabel	Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas	X2.1	0,867	0,443	Valid
	X2.2	0,826	0,443	Valid
	X2.3	0,751	0,443	Valid
	X2.4	0,577	0,443	Valid
	X2.5	0,532	0,443	Valid
	X2.6	0,691	0,443	Valid
	X2.7	0,903	0,443	Valid
	X2.8	0,595	0,443	Valid

Tabel 4.3
Hasil Uji *Pilot Test* Variabel Sistem Pengendalian Internal

Variabel	Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	X3.1	0,714	0,443	Valid
	X3.2	0,666	0,443	Valid
	X3.3	0,641	0,443	Valid
	X3.4	0,668	0,443	Valid
	X3.5	0,832	0,443	Valid
	X3.6	0,684	0,443	Valid
	X3.7	0,746	0,443	Valid
	X3.8	0,476	0,443	Valid
	X3.9	0,771	0,443	Valid

Tabel 4.4
Hasil Uji *Pilot Test* Variabel Pencegahan *Fraud*

Variabel	Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i>	Y1.1	0,551	0,443	Valid
	Y1.2	0,790	0,443	Valid
	Y1.3	0,752	0,443	Valid
	Y1.4	0,773	0,443	Valid
	Y1.5	0,813	0,443	Valid
	Y1.6	0,664	0,443	Valid
	Y1.7	0,672	0,443	Valid
	Y1.8	0,738	0,443	Valid

Sumber : Data Primer Diolah,2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan uji *pilot test* pada variabel Kompetensi Aparatur (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3) dan Pencegahan *Fraud* (Y) tersebut tidak terdapat pertanyaan yang tidak valid. Sehingga penelitian dapat dilanjutkan, dan kuisisioner dapat dibagikan kepada responden.

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Sukolilo terletak di sebelah ujung selatan dari Kabupaten Pati, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus. Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu dari 21 daerah Kecamatan di Kabupaten Pati yang terletak pada 27 Km dari ibukota Kabupaten Pati ke arah Selatan. Kecamatan

Sukolilo merupakan jalur utama jalan antar Kabupaten yang menghubungkan antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. Kecamatan Sukolilo terdiri atas 16 desa yaitu desa Pakem, desa Prawoto, desa Wegil, desa Kuwawur, desa Porang Paring, desa Sumpersoko, desa Tompegunung, desa Kedumulyo, desa Gadudero, desa Sukolilo, desa Kedungwinong, desa Baleadi, desa Wotan, Desa Baturejo, Desa Kasiyan dan desa Cengkalsewu. Kecamatan Sukolilo memiliki total luas daratan 15.874,0 km². Jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 adalah 94.404 jiwa, yang terdiri atas 47.191 jiwa laki-laki dan 47.213 jiwa perempuan. Penduduk Kecamatan Sukolilo mempunyai pekerjaan utama adalah petani dengan komoditas utama adalah padi, ketela, palawija. Selain itu tidak sedikit pula yang bekerja di sektor niaga, industri rumah tangga dan jasa.

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati



Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 2017-2022

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sukolilo di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kayen, di sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan, di sebelah barat dengan Kabupaten Kudus dan di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan.

Tabel 4.5
Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

No	Desa	Luas (km ²)	Persentase
1	Pakem	659	4,15
2	Prawoto	1.861	11,72

3	Wegil	1.422	8,96
4	Kuwawur	379	2,39
5	Porangparing	610	3,84
6	Sumbersoko	741	4,67
7	Tompegunung	684	4,31
8	Kedumulyo	786	4,95
9	Gadudero	954	6,01
10	Sukolilo	1.026	6,46
11	Kedungwinong	701	4,42
12	Baleadi	1.836	11,57
13	Wotan	2.320	14,62
14	Baturejo	1.037	6,53
15	Kasiyan	633	3,99
16	Cengkalsewu	225	1,42
Kec. Sukolilo		15874,0	100,0

Sumber : patikab.bps.go.id

Tabel 4.6
Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Menurut Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

No	Desa	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1	Pakem	37	6
2	Prawoto	54	6
3	Wegil	30	5
4	Kuwawur	25	4
5	Porangparing	15	4
6	Sumbersoko	16	2
7	Tompegunung	22	5
8	Kedumulyo	30	5
9	Gadudero	18	2
10	Sukolilo	59	10
11	Kedungwinong	33	4
12	Baleadi	35	9
13	Wotan	46	11
14	Baturejo	23	4

15	Kasiyan	13	3
16	Cengkalsewu	22	6
Kec. Sukolilo		478	86

Sumber : patikab.bps.go.id

Berdasarkan rincian tabel 4.5, Desa dengan luas wilayah terbesar adalah Desa Wotan yaitu 2.320 km² dan desa dengan luas terkecil adaalah Desa Cengkalsewu yaitu 225 km². Dan tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Sukolilo sebanyak 59 RT.

4.3 Gambaran Umum Responden Penelitian

Proses pengumpulan data menggunakan waktu selama 5 minggu dimulai dari 9 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023. Jumlah kuesioner yang disebarakan yaitu 48 dan semua kuesioner dapat disertakan untuk dianalisis.

Tabel 4.7
Analisis Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase (%)
Kuesioner yang didistribusikan	48	100
Kuesioner yang tidak dikembalikan	0	0
Kuesioner yang kembali	48	100

Sumber : Data Primer Diolah,2023

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang dibagikan sebanyak 48 butir dalam penelitian ini, tidak ada kuesioner yang tidak dikembalikan. Jumlah kuesioner yang didistribusikan 48 atau sebesar 100% kuesioner, dan kuesioner yang kembali 48 atau sebesar 100% kuesioner. Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung yaitu dengan menggunakan angket. Penyebaran Kuisioner dilakukan mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 13 November 2023. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diolah menggunakan *aplikasi SPSS 26*.

4.3.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Jabatan dan Tingkat Pendidikan Terakhir.

4.3.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik reesponden berdasarkan usia dibagi menjadi lima tingkatan yaitu kurang dari 25 tahun, 26 sampai dengan 35 tahun, 36

sampai dengan 45 tahun, 46 sampai dengan 55 tahun dan lebih dari 55 tahun.

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1.	<25 tahun	3	6,25%
2.	26-35 tahun	9	18,75%
3.	36-45 tahun	14	29,17%
4.	46-55 tahun	14	29,17%
5.	>55 tahun	8	16,67%
Jumlah		48	100%

Sumber : Data Primer Diolah,2023

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan usia <25 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 6,25%, jumlah responden dengan usia 26-35 tahun yaitu 9 orang atau sebesar 18,75%, jumlah responden dengan usia 36-45 tahun yaitu 14 orang atau sebesar 29,17%, jumlah responden dengan usia 45-55 tahun yaitu 14 Orang atau sebesar 29,17 %, dan jumlah responden dengan usia >55 tahun yaitu 8 orang atau sebesar 16,67%.

4.3.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi dua yaitu Laki-laki dan Perempuan.

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki--laki	43	89,58%
2.	Perempuan	5	10,42%
Jumlah		48	100%

Sumber : Data Primer Diolah,2023

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden Laki-laki adalah 43 orang atau sebesar 89,58% dan jumlah responden perempuan adalah 5 Orang atau sebesar 10,42%.

4.3.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dibagi menjadi tiga kategori yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan.

Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Kepala Desa	16	33,33%
2.	Sekretaris Desa	16	33,33%
3.	Kaur Keuangan	16	33,33%
Jumlah		48	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan jabatan Kepala Desa, Sekretaris desa, dan kaur keuangan adalah sama yaitu 16 orang atau 33,33%.

4.3.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dibagi dalam lima tingkatan yaitu, Pasca Sarjana, Sarjana, Diploma, SMA dan Lainnya.

Tabel 4.11
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Pasca Sarjana	1	2,08%
2.	Sarjana	12	25%
3.	Diploma	-	0%
4.	SMA	35	72,92%
5.	Lainnya	-	0%
Jumlah		48	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir Diploma dan Lainnya. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Pasca Sarjana adalah 1 orang atau sebesar 2,08%, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana adalah 12 orang 25%, dan jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMA adalah 35 orang atau 72,92%,. Sehingga dalam

penelitian ini, jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu 35 orang.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data yang mana dapat dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Kompetensi Aparatur (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3) dan Pencegahan *Fraud* (Y). Berikut merupakan uji statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 26 :

Tabel 4.12
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur	48	23	30	27.96	1.989
Akuntabilitas	48	32	40	35.69	2.280
Sistem Pengendalian Internal	48	32	41	35.79	2.021
Pencegahan Fraud	48	29	40	34.90	2.603
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kompetensi Aparatur (X1)

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 30 artinya nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-rata 27,96 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan memahami tentang kompetensi aparatur yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Nilai standar deviasi sebesar 1,989 lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

2. Akuntabilitas (X2)

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai minimum sebesar 32 dan nilai maksimum sebesar 40 artinya nilai tertinggi sebesar 40 dengan nilai rata-rata 35,69 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden mengerti dan memahami tentang akuntabilitas yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Nilai standar deviasi sebesar 2,280 lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

3. Sistem Pengendalian Internal (X3)

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai minimum sebesar 32 dan nilai maksimum sebesar 41 artinya nilai tertinggi sebesar 41 dengan nilai rata-rata 35,79 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden mengerti dan memahami tentang sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Nilai standar deviasi sebesar 2,021 lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

4. Pencegahan *Fraud* (Y)

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 40 artinya nilai tertinggi sebesar 40 dengan nilai rata-rata 34,90 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada intansinya adalah baik.

4.4.2 Uji Kualitas Data

4.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan hal yang diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing nilai indikator dan nilai konstruk. Suatu indikator dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Kriteria suatu nilai dapat dikatakan valid apabila nilai R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} . Pada pengujian ini diketahui bahwa $n = 48$ responden dan $alpha\ 0,05$ dengan rumus $df = n-2$

= 46 maka diketahui nilai R_{tabel} adalah 0,284. Nilai setiap item dapat dikatakan valid apabila lebih besar dari 0,284.

a. Kompetensi Aparatur (X1)

Tabel 4.13
Validitas Variabel Kompetensi Aparatur

Variabel	Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Kompetensi Aparatur	X1.1	0,563	0,284	Valid
	X1.2	0,750	0,284	Valid
	X1.3	0,808	0,284	Valid
	X1.4	0,745	0,284	Valid
	X1.5	0,768	0,284	Valid
	X1.6	0,694	0,284	Valid

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, variabel kompetensi aparatur menunjukkan bahwa nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, sehingga seluruh item pertanyaan kompetensi aparatur dikatakan valid.

b. Akuntabilitas (X2)

Tabel 4.14
Validitas Variabel Akuntabilitas

Variabel	Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas	X2.1	0,539	0,284	Valid
	X2.2	0,533	0,284	Valid
	X2.3	0,660	0,284	Valid
	X2.4	0,619	0,284	Valid
	X2.5	0,452	0,284	Valid
	X2.6	0,595	0,284	Valid
	X2.7	0,680	0,284	Valid
	X2.8	0,592	0,284	Valid

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, sehingga seluruh item pertanyaan akuntabilitas dikatakan valid.

c. Sitem Pengendalian Internal (X3)

Tabel 4.15
Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	X3.1	0,681	0,284	Valid
	X3.2	0,371	0,284	Valid
	X3.3	0,481	0,284	Valid
	X3.4	0,459	0,284	Valid
	X3.5	0,683	0,284	Valid
	X3.6	0,614	0,284	Valid
	X3.7	0,453	0,284	Valid
	X3.8	0,462	0,284	Valid
	X3.9	0,517	0,284	Valid

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, variabel sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, sehingga seluruh item pertanyaan sistem pengendalian internal dikatakan valid.

d. Pencegahan *Fraud* (Y)

Tabel 4.16
Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i>	Y1.1	0,573	0,284	Valid
	Y1.2	0,568	0,284	Valid
	Y1.3	0,714	0,284	Valid
	Y1.4	0,470	0,284	Valid
	Y1.5	0,582	0,284	Valid
	Y1.6	0,553	0,284	Valid
	Y1.7	0,661	0,284	Valid
	Y1.8	0,656	0,284	Valid

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, variabel pencegahan *fraud* menunjukkan bahwa nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, sehingga seluruh item pertanyaan pencegahan *fraud* dikatakan valid.

4.4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator untuk menguji reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*, apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 menunjukkan instrument yang digunakan reliable. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.17 :

Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas

variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,861	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,725	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,682	0,60	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,746	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas indikator dari variabel Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud* diperoleh *Cronbach Alpha* > 0,60 yang artinya semua indikator dinyatakan reliabel.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

4.4.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, yaitu jika nilai sig > 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal. Selain itu, uji normalitas dapat dilihat juga dengan mengetahui persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang diketahui melalui grafik normal P-P Plot. Apabila persebaran data mengikuti pola garis lurus diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar.

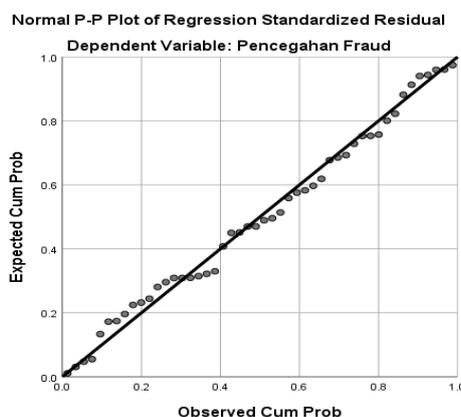
Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.31151312
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.060
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, menunjukkan nilai signifikan pada Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,200. Angka tersebut menunjukkan nilai 0.200 lebih besar dari nilai signifikan 0,05 yang berarti residual berjalan dengan normal. Dapat disimpulkan bahwa residual memenuhi uji normalitas data.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas P-Plot



Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal pada grafik plot normal, dan distribusinya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.3.2 Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Multikolenieritas bisa diketahui dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) pada variabel bebas dan variabel terikatnya. Adapun untuk dapat melihat nilai multikolenieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* > 0,10 dan memiliki VIF < 10. Hasil uji multikolenieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.19
Hasil Uji Multikolenieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Aparatur	.846	1.182
	Akuntabilitas	.814	1.228
	Sistem Pengendalian Internal	.722	1.385
a. Dependent Variabel: Pencegahan Fraud			

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa nilai toleransi dari VIF untuk variabel adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Aparatur memiliki nilai toleransi 0,846 dan VIF 1,182
2. Akuntabilitas memiliki nilai toleransi 0,814 dan VIF 1,228
3. Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai toleransi 0,722 dan VIF 1,358

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolenieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas

dalam model regresi ini tidak terdapat multikolenieritas, karena regresi yang baik sesuai dengan ketentuan yaitu bebas dari gejala multikolenieritas.

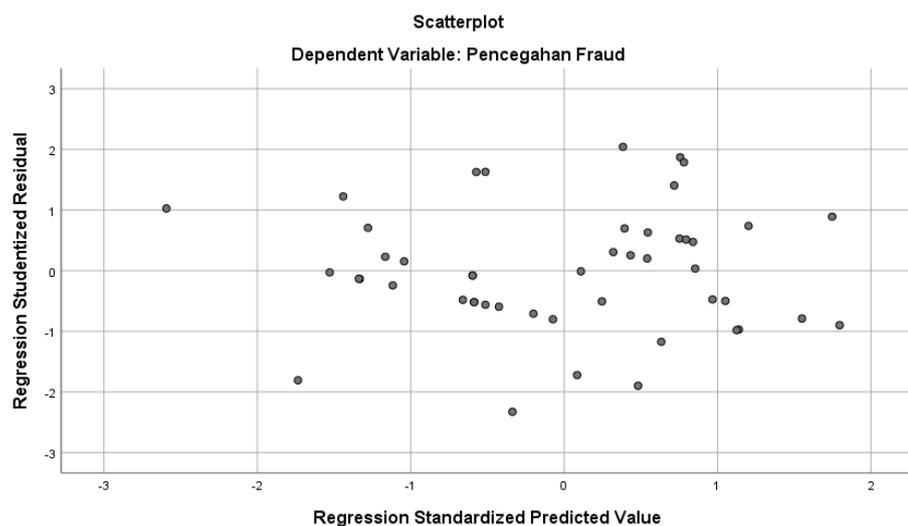
4.4.3.3 Uji Heterokedastistas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak memiliki heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan pada metode *scatterplot* atau grafik dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu. Dasar analisisnya yaitu :

1. Jika pada titik pola penyebarannya tidak jelas, dan menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi.
2. Jika pada titik pola membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 26, diperoleh heterokedastisitas sebagai berikut :

Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastiditas



Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan gambar *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas atau di bawah angka 0

pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heterokedastisitas.

Selain dengan metode scatterplot, uji heterokedastisitas dilihat menggunakan uji glejser. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absoulth residul $< 0,50$ maka nilai tersebut menunjukkan adanya grjala heterokedastisitas. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,50$ maka nilai tersebut menunjukkan variabel independen bebas dari gejala heterokedastisitas. Hasil dari uji glejser dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.20
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12.028	4.005		-3.003	.004
	Kompetensi Aparatur	.091	.103	.127	.876	.386
	Akuntabilitas	.156	.092	.252	1.701	.096
	Sistem Pengendalian Internal	.160	.110	.228	1.450	.154

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 4.20 di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel bebas memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4.4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil

dari uji analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 4.21
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.581	7.377		3.874	.000
	Kompetensi Aparatur	.341	.190	.260	1.788	.081
	Akuntabilitas	.446	.169	.391	2.632	.012
	Sistem Pengendalian Internal	-.534	.203	-.415	-2.631	.012

a. Dependent Variabel: Pencegahan Fraud

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 26, maka diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 28,581 + 0,341X_1 + 0,446X_2 - 0,534X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Konstanta (α) sebesar 28,581, menunjukkan bahwa nilai konstan pada variabel independen kompetensi aparatur, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal diasumsikan sama dengan nol, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 28,581.
- b. Koefisien regresi linier variabel kompetensi aparatur sebesar 0,341. Hal ini berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan kompetensi aparatur mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai pencegahan *fraud* akan mengalami kenaikan sebesar 0,341 satuan.
- c. Koefisien regresi linear akuntabilitas bernilai 0,446. Hal ini berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan

akuntabilitas mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai pencegahan *fraud* akan mengalami kenaikan sebesar 0,446 satuan.

- d. Koefisien regresi linier variabel sistem pengendalian internal sebesar -0,534. Hal ini berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan akuntabilitas mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai pencegahan *fraud* akan mengalami kenaikan sebesar 0,534 satuan.

4.4.4.2 Uji T

Uji T digunakan untuk menentukan apakah variabel independen (kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal) berpengaruh terhadap variabel dependen (pencegahan *fraud*). Syarat uji T sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.
- $T_{tabel} = t = (\alpha/2 ; n-k-1) = t (0,05/2 ; 48-3-1) = t (0,025 ; 44) = 2,015$

Untuk mengetahui hasil pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.22
Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.581	7.377		3.874	.000
	Kompetensi Aparatur	.341	.190	.260	1.788	.081
	Akuntabilitas	.446	.169	.391	2.632	.012

Sistem Pengendalian Internal	-0.534	0.203	-0.415	-2.631	0.012
a. Dependent Variabel: Pencegahan Fraud					

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.22, variabel kompetensi aparatur (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,788, dan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,81 > 0,05$. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,788 < 2,015$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) yang berbunyi kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.22, variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai T_{hitung} sebesar 2,632, dan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} ($2,632 > 2,015$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_2) yang berbunyi akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.22, variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai T_{hitung} sebesar -2,631, dan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} ($-2,631 < 2,015$), maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis (H_3) yang berbunyi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

4.4.4.3 Uji Simultan (F)

Uji hipotesis secara simultan (F) digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (alghozali).

Adapun syarat uji F yaitu sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y.
- b. $F_{tabel} = F(k-1 ; n-k) = F(3 ; 44) = 2,82$

Berikut merupakan hasil uji yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.23
Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67.354	3	22.451	3.934	.014 ^b
	Residual	251.125	44	5.707		
	Total	318.479	47			
a. Dependent Variabel: Pencegahan Fraud						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas						

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.23 di atas, dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 3,934 dengan nilai F_{tabel} adalah 2,82, sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3,934 > 2,82$ dan tingkat signifikansi $0,014 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi aparatur (X1), akuntabilitas (X2) dan sistem pengendalian internal (X3) secara bersamaan berpengaruh

secara simultan terhadap variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

4.4.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase variabel independen (kompetensi aparatur, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal) mempengaruhi variabel dependen (pencegahan *fraud*). Hasil Uji R^2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.24
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.211	.158	2.389
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas				
b. Dependent Variabel: Pencegahan Fraud				

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 26,2023

Berdasarkan tabel 4.24, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,158 atau setara dengan 15,8%. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan variabel Kompetensi aparatur (X1) dan Akuntabilitas (X2) dan Sistem Pengendalian Internal (X3) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y) adalah sebesar 15,8%. Sedangkan sisanya 0,842 atau setara dengan 84,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 48 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang ada pada pemerintah Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Untuk memberikan informasi mengenai penelitian ini tentang variabel Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. Dari hasil uji validitas melihat bahwa seluruh pernyataan yang ada didalam kuesioner dan diisi oleh sampel sebanyak 48 responden dinyatakan valid dan reliable, karena $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan semua pertanyaan memiliki nilai *crobach's alpha* $> 0,60$.

Dalam penelitian ini hasil dari analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi dengan nilai konstanta sebesar 28,581. Dari hasil uji F melihat bahwa adanya pengaruh simultan antara semua variabel independen (kompetensi aparatur, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal) terhadap variabel dependen (pencegahan *fraud*) dengan nilai signifikan $0,014 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} (3,934) > F_{tabel} (2,82)$. Selanjutnya nilai dari *Adjusted R square* melihat angka sebesar 0,518 atau setara dengan 15,8%, artinya variabel kompetensi aparatur, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebesar 15,8% dan sisanya sebesar 84,2% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini. Adapun uji analisis regresi linier berganda dan uji t berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut :

4.5.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda dan uji t. Diperoleh nilai koefisien kompetensi aparatur pada uji analisis regresi linier berganda sebesar 0,341 satuan, hal ini berarti ketika variabel independen lainnya tetap dan kompetensi aparatur mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai dalam pencegahan *fraud* mengalami kenaikan sebesar 0,341 satuan. Jadi, semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil uji t diperoleh nilai kompetensi aparatur t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,788 < 2,015$) dan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,081 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis H_1 dalam penelitian ini tidak dapat diterima atau **ditolak**.

Kompetensi aparatur tidak mempengaruhi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan sukolilo, karena sebagian besar aparatur desa memiliki konteks pendidikan yang tidak sama. Dalam hal latar belakang pendidikan terakhirnya, aparatur desa di Kecamatan Sukolilo, tingkat SMA terdapat 35 orang atau setara dengan 72,92%, di tingkat sarjana sebanyak 12 orang atau setara dengan 25% dan tingkat Pasca Sarjana sebanyak 1 orang atau setara dengan 2,08%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidya Vitta Adhivinna dkk, yang menghasilkan variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh

terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.⁷⁰ Hasil penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Putu Ayu Armelia & Made Arie Wahyuni yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.⁷¹

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwah Yusuf dkk, yang menghasilkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa.⁷² Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Islamiyah dkk, dalam penelitiannya menghasilkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.⁷³

Kompetensi aparatur tidak mempengaruhi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan sukolilo, karena sebagian besar aparatur desa memiliki konteks pendidikan yang tidak sama. Dalam hal latar belakang pendidikan terakhirnya, aparatur desa di Kecamatan Sukolilo, tingkat SMA terdapat 35 orang atau setara dengan 72,92%, di tingkat sarjana sebanyak 12 orang atau setara dengan 25% dan tingkat Pasca Sarjana sebanyak 1 orang atau setara dengan 2,08%.

Upaya dalam meningkatkan kompetensi aparatur dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, mengikuti bimtek, dan diklat yang berkaitan dengan manajemen pemerintah desa yang diberikan kepada aparatur desa. Sehingga aparatur akan semakin terampil dan berkompoten dalam mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini bertolak belakang dengan teori *stewardship* dimana terosi tersebut menerangkan bagaimana mengelola organisasi yang baik yang salah satunya dengan cara meningkatkan kompetensi.

4.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda dan uji t. Diperoleh nilai koefisien akuntabilitas pada uji analisis regresi linier berganda sebesar 0,534 satuan, hal ini berarti ketika

⁷⁰ Vidya Vitta Adhivinna, Mega Selawati, and M. Sulkhanul Umam, "KOMPETENSI APARATUR DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," *Jurna Aplikasi Akuntansii* 6, no. 2 (2022): 63–74, <https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/138>.

⁷¹ Putu Ayu Armelia and Made Arie Wahyuni, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Moral Sesitya Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 61, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJAKUN/article/view/26125>.

⁷² Yusuf et al., "Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah)."

⁷³ Islamiyah, Made, and Sari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak."

variabel independen lainnya tetap dan akuntabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai dalam pencegahan *fraud* mengalami kenaikan sebesar 0,534 satuan. Jadi, semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil uji t diperoleh nilai akuntabilitas t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,632 > 2,015$) dan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis H₂ dalam penelitian ini **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang Adi Kurniawan Saputra dkk, yang menghasilkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.⁷⁴ Adapun hasil penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Braen Alfon Dangeubun dan Yohanes Zefnath Warkula, yang menghasilkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh pada kecurangan dalam pengelolaan dana desa.⁷⁵

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deni Ramdani dan Dien Noviany R, dalam penelitiannya menghasilkan bahwa variabel praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.⁷⁶ Hasil penelitian lainnya yang tidak sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Melisa Eka Sari dkk, yang menghasilkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.⁷⁷

Akuntabilitas tidak hanya sekedar pelaporan keuangan yang reliabel, tetapi juga menunjukkan epektifitas dalam seluruh kegiatan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, proses dan pertanggungjawaban yang harus dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepercayaan penuh dalam menjalankan operasi pemerintahan secara efektif dan fisien, keandalan

⁷⁴ Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitasari, and Ni I Made Intan Priliandani dan Gst B Ngr P Putra, "Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 10, no. 2 (2019): 168–176, <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>.

⁷⁵ Braen Alfon Dangeubun and Yohanes Zefnath Warkula, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Accounting Research Unit: ARU Journal* 3, no. 2 (2022): 35–49, <http://eprints.umpo.ac.id/8681/>.

⁷⁶ Deni Ramadani, "Pengaruh Praktek Akuntabilitas, Moralitas Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa."

⁷⁷ Sari, Melisa Eka, Fefri Indra Arza, and Salma Taqwa., "PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA."

pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan grand theory pada penelitian ini yakni teori *stewardship* yang dimana mengelola organisasi dengan baik, melalui pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabel.

4.5.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda dan uji t. Diperoleh nilai koefisien sistem pengendalian internal pada uji analisis regresi linier berganda sebesar 0,341 satuan, hal ini berarti ketika variabel independen lainnya tetap dan sistem pengendalian internal mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai dalam pencegahan *fraud* mengalami kenaikan sebesar 0,341 satuan. Jadi, semakin tinggi tingkat sistem pengendalian internal maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil uji t diperoleh nilai sistem pengendalian internal t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-2,631 < 2,015$) dan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis H_1 dalam penelitian ini tidak dapat diterima atau **ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kivaayatul Akhyaar dkk, yang menghasilkan variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.⁷⁸ Adapun hasil penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Dwi Rahayu dkk, yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.⁷⁹

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Santi Putri Laksmi dan I Ketut Sujana yang menghasilkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.⁸⁰ Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Sri Isa Dewi Jayanti dan Ketut Alit Surdana,

⁷⁸ Akhyaar et al., "PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SISTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA."

⁷⁹ Rahayu, Rahmayati, and Narulitasari, "Determinan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa."

⁸⁰ Laksmi and Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."

dalam penelitiannya menghasilkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.⁸¹

Kurangnya pemahaman terhadap sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa di lingkungan pemerintah desa membuat upaya pencegahan *fraud* menjadi sulit. Selain itu, sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukolilo belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa pemerintahan desa di Kecamatan Sukolilo belum menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Misalnya, tingkat keterampilan bawahan tidak dapat ditentukan, metrik risiko tidak dapat ditentukan, struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan, dan tidak adanya tim audit independen terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa.

Apabila mengacu pada teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey, maka alasan seseorang melakukan tindakan *fraud* dapat terjadi karena salah satunya merupakan suatu peluang, suatu keadaan yang dimiliki organisasi dapat membuka pintu bagi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*, seperti kegagalan dalam menerapkan pengendalian internal organisasi dengan benar, yang dapat menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Oleh karena itu, pengendalian internal dapat dikatakan tidak berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dalam teori *stewardship* yang mengacu pada pengelolaan organisasi dengan baik melalui pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabel, dimana masih belum maksimal atau belum berkontribusi melalui sistem pengendalian internal untuk mencegah *fraud*.

⁸¹ Luh Sri Isa Dewi Jayanti and Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing Dan SPI Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 3 (2019): 1117–1131, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/54350>.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hipotesis dan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai kompetensi, terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian pemerintahan desa di Kecamatan Sukolilo kurang adanya pelatihan, kurang paham dalam kode etik, kurang pengetahuan dalam mengoperasikan *MS. Excel* dengan baik dalam pengelolaan dana desa.
2. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi Akuntabilitas pada instansi pemerintahan desa maka semakin tinggi juga untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan lemahnya pengetahuan pengendalian internal dapat dilihat dari belum terimplementasikan sistem pengendalian internal dengan baik, terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian pemerintahan desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tidak menetapkan batasan toleransi resiko, kegiatan pengendalian tidak dievaluasi secara teratur, tidak melakukan pemantauan secara periodik dalam pengelolaan dana desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati hanya menggunakan beberapa variabel independen, yaitu kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal.
2. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini hanya memiliki pengaruh signifikansi sebesar 15,8% terhadap variabel dependen.
3. Wilayah dan ruang lingkup pada penelitian ini terbatas, yaitu hanya dalam ruang lingkup Pemerintah Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

4. Instrumen kuesioner (angket) dalam penelitian ini kurang tepat.
5. Dalam penelitian ini tidak semua aparatur desa yang dilibatkan dalam pengisian kuesioner, hanya Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kaur Keuanagan Desa saja yang mengisi kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan yakni :

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa seperti moralitas individu, budaya organisasi, kesadaran *anti-fraud*, dan *whistleblowing*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperluas ruang lingkup untuk objek penelitian, yaitu pada Pemerintah Desa yang lainnya sehingga responden yang diperoleh lebih banyak lagi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lainnya, seperti wawancara kepada aparatur desa sehingga mendapatkan hasil yang lebih menggambarkan keadaan sebenarnya serta dapat memperoleh data yang lebih terperinci.
4. Pemerintah Desa diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa, dengan mengikuti pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis sehingga pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
5. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya agar penggunaan dana desa dapat bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan Saputra, Komang, Putu Dian Pradnyanitasari, and Ni I Made Intan Priliandani dan Gst B Ngr P Putra. “Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 10, no. 2 (2019): 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>.
- Akhyaar, Kivaayatul, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, Wahyu Anggit Prasetya, and Universitas Muhammadiyah Magelang. “PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA.” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 202–217.
- Armelia, Putu Ayu, and Made Arie Wahyuni. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Moral Sesitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 61. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJAKUN/article/view/26125>.
- Asrori. “Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus.” *Jurnal Bina Praja* 06, no. 02 (2014): 101–116.
- Ayem, Sri, and Kirana Feby Kusumasari. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi” 10, no. 2 (2020): 160–169.
- Babulu, Natalia Lily. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud.” *Juni* 5, no. 2 (2020): 18–26. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP18>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I). “Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.” *Jakarta* (2017): 1–85.
- Baihaqi Annizar. “Korupsi Dana Desa, Kades Kedungmulyo Pati Rugikan Negara Hingga Rp 107,4 Juta.” *Jatengtoday.Com*. Last modified 2019. <https://jatengtoday.com/korupsi-dana-desa-kades-kedungmulyo-pati-rugikan-negara-hingga-rp-1074-juta>.
- Dangeubun, Braen Alfon, and Yohanes Zefnath Warkula. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Accounting Research Unit: ARU Journal* 3, no. 2 (2022): 35–49. <http://eprints.umpo.ac.id/8681/>.
- Deni Ramadani, Dien Noviany R. “Pengaruh Praktek Akuntabilitas , Moralitas Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *JABKO :*

- jurnal akuntansi bisnis kontemporeransi dan bisnis kontemporer* 1, no. 2 (2021): 96–107.
- Dewi, Lianita Puspita. “Pengaruh Aparatur, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan , Klaten)” 0832, no. September (2022): 327–340.
- Eliza, Yulina, and Sekolah. “Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang).” *Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2015): 86–100.
- Ferdianti, Gharin Eka, and Hero Priono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon.” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 11, no. 2 (2022): 28.
- Herlianto, Didit. *MANAJEMEN KEUANGAN DESA*. Edited by Andy Gp and Tim Gosyen. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.
- Idzdiana, Firda, Ratno Agriyanto, and Firdha Rahmiyanti. “Research Paper THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES CAPABILITIES , APPLICATION OF SYSTEMS OF INTERNAL CONTROL , AND THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY REPORT.” *Global Financial Accounting Journal* 07, no. 01 (2023): 1–13. <https://journal.uib.ac.id/index.php/gfa%0ATHE>.
- Indah Aprilia, Kadek Wiwin, and Ni Wayan Yuniasih. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandes.” *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2021): 25–45. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1521>.
- Islamiyah, Faridatul, Anwar Made, and Ati Retna Sari. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 1–13. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/4452>.
- Klara Wonar, Dr. Syaikhul Falah, SE., M.Si, Bill J.C Pangayow, SE., M.Si., Ak., CA. “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN MORAL SENSITIVITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI” 1, no. 2 (2018): 63–89.
- Kustiawan, Memen. “PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN” XX, no. 03 (2016): 345–362.
- Laila Nur Rahimah, Yetty murni, Shanti Lysandra. “PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN

- KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN Dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi Dan Desa Gunungjaya Kecamat.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 06, no. 48 (2018): 139–154. <https://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/226>.
- Laksmi, Santi Putri, and I Ketut Sujana. “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *E-Jurnal Akuntansi* 26 (2019): 2155.
- Luh Sri Isa Dewi Jayanti, and Ketut Alit Suardana. “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing Dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 3 (2019): 1117–1131. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/54350>.
- Mouallem, Lara El, and Farhad Analoui. “The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study From the Middle East (Lebanon).” *European Scientific Journal* 1, no. June (2014): 245–254.
- Muhamad Mu’iz Raharjo, S. STP.M.Si. *PENGELOLAAN DANA DESA*. Edited by Tarmizi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Njonjie, Philep, Grace Nangoi, Hendrik Gamaliel, Program Studi, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Sam. “Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara” (2014): 79–88.
- Rahayu, Dwi, Anim Rahmayati, and Devi Narulitasari. “Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa.” *Among Makarti* 11, no. 2 (2019): 97–107.
- Ramadhan, Wahyu, and Fefri Indra Arza. “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 3, no. 4 (2021): 822–835. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>.
- Safuan, Ismartaya, and Budiandru. “Fraud Dalam Perspektif Islam.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 219–228.
- Sari, Melisa Eka, Fefri Indra Arza, and Salma Taqwa. “PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1443–1457. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/154/113>.
- Sariwati, Ni Wayan, and Ni Komang Sumadi. “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa.”

- Hita Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 279–291.
- Sudaryanti, Dwiyani. “Akuntansi Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi Di Indonesia.” *Tera Ilmu Akuntansi* 10, no. 1 (2011): 58–76.
- Sugiyono. “Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *STATISTIKA UNTUK PENELITIAN*. Edited by M. Pd Dra. Endang Mulyatiningsih. *Alfabeta Bandung*. Vol. 12. Bandung: CV ALFABETA, 2014.
- Suryani, Ni Made, and Herkulanus Bambang Suprasto. “Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 8 (2021): 2011.
- Taufik, Taufeni, and Azwir Nasir. “Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi THE INFLUENCE OF VILLAGE APARATURE COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND WHISTLEBLOWING SYSTEM ON FRAUD PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT WITH INDIVIDUAL MORALITY AS MODERATED VARIABLES (STUDY IN VILLAGES IN BENGKALIS DI.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Usman, Bhima Azis, Taufeni Taufik, and M. Rasuli. “PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (STUDI PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR).” *JURNAL EKONOMI* 23, no. 4 (2015): 18–34. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/5830>.
- Vidya Vitta Adhivinna, Alfi Prastika Agustin. “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 25–35.
- Vidya Vitta Adhivinna, Mega Selawati, and M. Sulkhanul Umam. “KOMPETENSI APARATUR DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA.” *Jurna Aplikasi Akuntansii* 6, no. 2 (2022): 63–74. <https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/138>.
- Widyawati, Ni Putu Agustina, Edy Sujana, and Gede Adi Yuniarta. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 3 (2019): 368–379.
- Yuliansyah, Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Edited by Denny Susanto. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016. <http://www.penerbitsalemba.com>.
- Yusuf, Marwah, Aswar, Irmawati Ibrahim, Yusdhaniar, and Fulia Indah Waty. “Pengaruh

Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah).”
Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi 6, no. 2 (2021): 1–12.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Hal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat,

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya :

Nama : Iqbal Fakhoironi

NIM : 1905046040

Jurusan/Fakultas : Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa”**. Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama surat ini dengan lengkap dan sesuai keadaan yang sebenarnya. Data yang diperoleh nantinya akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Oleh karena itu mohon untuk Bapak/Ibu meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin.

Semarang, 5 Oktober 2023



IQBAL FAKHOIRONI
NIM. 1905046040

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, AKUNTABILITAS DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Empris Pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)

A. Identitas Responden

Mohon memberi tanda checklist (√) pada kotak yang sesuai anda pilih atau lengkapi pada tempat yang tersedia

1. Nama Desa :
2. Nama Responden :
3. Umur : <25 Tahun 26-35 Tahun
 36-45 Tahun 46-55 Tahun
 >55 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
5. Jabatan : Kepala Desa Sekretaris Desa
 Kaur Keuangan
6. Tingkat Pendidikan : SMA/Sederajat Diploma
 Sarjana Pasca Sarjana
 Lainnya

B. Petunjuk Pengisian

1. Pada kuesioner ini Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang Bapak/Ibu anggap sesuai. Terdapat lima alternatif jawaban untuk setiap pertanyaannya, antara lain :

Jawaban	Keterangan	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
N	Netral	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

2. Bapak/Ibu dimohon hanya memberikan satu pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai/mewakili situasi yang sebenarnya.

KUESIONER

A. Variabel Kompetensi Aparatur (X1)

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Latar belakang, pengalaman, dan tingkat pendidikan mempengaruhi tugas / pekerjaan dimana saya ditempatkan					
2	Saya meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan teknis terkait pengelolaan dana desa					
3	Saya memahami kode etik pegawai yang bersifat formalistik seperti disiplin yang diukur dari penyelesaian apa yang diperintah atasan					
4	Saya melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan penuh kesopanan dan keramahan					
5	Saya dapat mengoperasikan komputer dengan baik khususnya <i>MS. Excel</i>					
6	Saya mampu mengerjakan tugas yang diberikan selesai tepat waktu (sesuai deadline yang ditentukan)					

B. Variabel Akuntabilitas (X2)

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintahan desa selalu melakukan perencanaan anggaran					
2	Pemerintahan desa membuat rencana kinerja sebelumnya untuk melihat perkembangan pelaksanaan dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan desa					
3	Kinerja dari pemerintah desa dapat diukur karena selalu membuat laporan kinerja					
4	Pemerintah desa selalu melakukan pencatatan atas kegiatan keuangan yang dilaksanakan					
5	Penyajian laporan disajikan secara tertulis, tepat waktu dan dapat dipahami					
6	Pemerintah desa menyajikan laporan keuangan dan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban					
7	Laporan keuangan disusun sesuai prosedur dan aturan yang berlaku					
8	Terdapat pemeriksaan / audit					

C. Variabel Sistem pengendalian Internal (X3)

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Desa ditempat Saya bekerja terdapat struktur organisasi yang jelas					
2	Adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upaya meningkatkan SDM yang jujur dan bertanggung jawab terhadap tugasnya					
3	Adanya penilaian terhadap risiko ditempat Saya bekerja					
4	Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko ditempat Saya bekerja					
5	Kegiatan pengendalian ditempat Saya dievaluasi secara teratur					
6	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik					
7	Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan					
8	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa					
9	Pemantauan dilakukan secara periodik untuk dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh Desa					

D. Variabel Pencegahan *Fraud* (Y)

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Terdapat komitmen antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjalankan kebijakan anti <i>fraud</i>					
2	Pemerintahan Desa telah mengimplementasikan program pengendalian anti- <i>fraud</i> berdasarkan nilai yang dianut desa					
3	Terdapat prosedur penanganan pencegahan <i>fraud</i> secara tertulis dan baku					
4	Pemerintahan Desa memberlakukan aturan perilaku untuk membangun budaya jujur dan keterbukaan pegawai didalam desa					
5	Pemerintahan Desa telah membentuk sebuah tim untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh sekelompok orang dalam organisasi					
6	Terdapat pembagian tugas yang jelas sehingga tidak ada satu orang yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi					
7	Desa mengadakan pelatihan secara professional dalam pengembangan karir untuk mendongkrak semangat kerja pegawai yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan kecurangan					
8	Terdapat staf berpengalaman, khususnya staf yang peka terhadap sinyal-sinyal <i>fraud</i>					

Lampiran 2 Surat Perizinan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PATI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kolonel Sugiono No. 77 PATI Kode Pos 59113
Telepon : (0295) 383231 website : kesbangpol.patikab.go.id
Faksimile : (0295) 384324 email : kesbangpol@patikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 070/206/X/2023

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Memperhatikan : Surat dari an Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tanggal 05 Oktober 2023 Nomor : 3643/Un.10.5/D1/PG.00.00/10/2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : IQBAL FAKHOIRONI
2. Alamat : Ds. Prawoto RT 006 RW 003 Kec. Sukolilo Kab. Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : **Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa**
- b. Tempat / lokasi : se-Kecamatan Sukolilo
- c. Bidang Penelitian : Akuntansi Syariah
- d. Waktu Penelitian : 10 Oktober 2023 s/d selesai
- e. Penanggung Jawab : Nur Fatoni
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/ Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pati, 10 Oktober 2023

An KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI
Kabid. Poldagri dan Ormas



Herman Setiawan, S.H
Pembina
NIP.19810530 200501 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN SUKOLILO**

JL. RAYA PATI-SUKOLILO KM 27 KODE POS 59172

Email : kecamatansukolilo.pati@gmail.com

Telp : (0295) 4101 842

Website : kecamatansukolilo.pati@gmail.com

Faximile : (0295) 4101 842

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/329

1. Dasar : Surat Rekomendasi Magang Dan/Atau Kegiatan Sejenisnya dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Nomor : 070/206/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

2. Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ANDRIK SULAKSONO, S.STP,M.Si

NIP : 198408182002121001

Pangkat/Gol. : Pembina /TV a

Jabatan : CAMAT SUKOLILO

Memberikan keterangan kepada :

Nama : IQBAL FAKHOIRONI

Bidang Penelitian : Akuntansi Syariah

Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Ds. Prawoto RT 006 RW 003 Kec. Sukolilo Kab. Pati

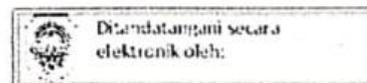
Bahwa yang bersangkutan benar - benar telah mengadakan penelitian dengan pengisian Kuesioner guna menyusun Skripsi dengan Judul "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, AKUNTABILITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA",

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sukolilo

Tanggal : 16 Oktober 2023

CAMAT SUKOLILO



ANDRIK SULAKSONO, S.STP,M.Si

Pembina

NIP. 198408182002121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://e-layang.patikab.go.id>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 3643/Un.10.5/D1/PG.00.00/10/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Riset / Penelitian

05 Oktober 2023

Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Kepala Kesbangpol Kabupaten Pati memberikan rekomendasi izin riset / Penelitian kepada :

Nama : IQBAL FAKHOIRONI
Nim : 1905046040
Semester : IX
Jurusan / Prodi : S1 AKUNTANSI SYARI'AH
Alamat : Dk. Lembur, RT/RW 07/03, Desa Prawoto, Kec Sukolilo, Kab Pati.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi.
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA.
Waktu Penelitian : 9 Oktober - 30 Oktober 2023
Lokasi Penelitian : Desa se-Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Demikian surat permohonan rekomendasi izin riset / penelitian, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Institusi/lembagaan,


Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Lampiran 3 Lampiaran Dokumentasi Data











Lampiran 4 Lampiran Tabulasi Data

A. Kompetensi Aparatur

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total X1
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	5	4	4	27
5	5	5	4	4	5	28
4	4	5	5	4	5	27
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	4	5	27
5	4	5	5	4	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	5	4	5	28
5	5	5	5	5	4	29
5	5	4	4	4	4	26
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	4	5	27
5	4	4	4	4	4	25
5	4	5	5	4	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	4	4	25
4	5	5	5	4	5	28
5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	5	4	5	28
5	5	5	5	4	5	29
5	4	4	4	4	4	25
5	4	5	5	5	5	29
4	4	4	5	4	5	26

4	4	4	4	3	4	23
5	5	5	5	4	5	29
4	4	4	4	4	5	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	5	5	5	29
5	4	4	4	4	4	25

B. Akuntabilitas

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total X2
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	4	39
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	4	5	4	5	5	4	37
5	4	5	4	5	5	5	5	38
4	4	5	5	4	5	4	4	35
5	5	4	4	4	4	4	4	34
5	4	4	4	4	4	4	4	33
5	4	5	4	4	5	4	4	35
5	5	5	4	4	5	5	5	38
5	5	4	4	4	4	4	4	34
5	5	4	5	4	5	5	4	37
5	4	4	5	4	5	5	4	36
5	4	4	4	4	4	5	4	34
5	5	5	4	4	5	5	5	38
5	5	4	4	4	4	4	4	34
5	5	5	4	4	4	4	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	5	4	4	5	4	3	34
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	4	5	5	4	38
4	4	5	5	4	5	5	4	36
4	4	5	5	4	5	5	4	36
5	5	5	5	4	5	4	4	37
5	4	4	4	4	5	4	4	34
4	4	4	5	5	4	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	5	33
5	5	5	5	5	4	4	4	37
5	4	5	5	5	5	5	4	38
4	4	4	5	4	4	4	4	33
5	4	4	5	5	5	5	4	37
4	4	4	4	4	4	5	4	33

5	5	5	5	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	5	5	4	35
5	5	4	4	4	4	5	4	35
4	4	4	4	5	4	4	4	33
5	5	4	5	4	4	5	4	36
5	4	4	5	4	5	4	4	35
4	4	4	4	5	4	4	4	33
4	5	4	4	5	4	5	4	35
4	5	4	4	4	4	4	4	33
5	5	4	4	5	4	4	4	35
5	5	5	5	5	4	5	5	39
5	5	4	5	4	4	5	5	37
5	5	4	5	4	4	5	5	37

C. Sistem Pengendalian Internal

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Total X3
5	5	4	4	4	5	4	4	4	39
5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
5	4	4	4	4	5	5	5	5	41
5	4	4	4	3	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	3	4	3	4	4	4	3	33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	3	4	3	4	4	4	4	34
4	4	3	4	3	4	4	4	3	33
5	4	4	4	4	4	4	4	5	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	3	36
5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
4	4	4	4	5	5	4	4	3	37
5	4	3	4	3	4	4	4	4	35
5	4	4	4	4	5	4	4	3	37
4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
4	4	3	4	3	4	4	4	3	33
4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
4	4	4	4	3	4	3	3	3	32
5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
5	4	4	4	4	5	4	4	3	37
5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	4	4	5	3	36

4	4	4	4	3	5	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
5	4	4	3	3	4	4	4	4	35
4	4	3	4	3	4	4	4	3	33
5	4	4	4	4	4	3	4	3	35
4	4	4	3	3	4	4	4	3	33
5	4	4	4	4	4	3	4	3	35
4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	3	3	4	4	3	4	33
4	4	4	3	3	4	4	3	4	33
4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
4	4	4	3	4	4	3	4	3	33
4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
5	4	5	4	4	5	4	4	4	39
5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
5	4	4	4	4	5	4	4	4	38

D. Pencegahan *Fraud*

Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Total Y
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	4	4	5	4	5	37
5	4	5	5	5	5	4	5	38
4	4	4	4	3	4	4	4	31
4	4	3	4	3	4	3	4	29
4	3	3	4	4	4	4	3	29
5	4	4	5	4	5	5	4	36
5	4	5	5	5	5	5	4	38
5	5	5	5	4	5	5	5	39
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	3	4	37
5	5	5	5	4	5	5	5	39
5	5	5	5	4	5	5	4	38
5	5	5	4	3	5	5	3	35
4	5	4	4	4	4	4	4	33
5	4	4	5	4	4	4	3	33
4	4	4	5	4	5	3	4	33
4	5	5	5	4	4	5	5	37
4	4	4	4	4	5	4	4	33
4	4	4	5	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	5	4	4	33
5	4	5	4	4	5	4	4	35
4	4	4	5	4	4	3	3	31

5	4	4	5	4	5	4	4	35
4	4	4	5	3	5	4	4	33
5	5	3	4	4	4	4	4	33
4	5	3	5	4	4	4	4	33
5	4	4	4	3	5	4	4	33
4	4	4	5	5	4	4	4	34
4	4	4	4	4	5	4	4	33
5	4	4	4	4	5	4	4	34
4	5	4	4	5	4	4	5	35
4	5	5	4	4	4	4	4	34
5	4	5	5	4	5	4	4	36
4	5	4	4	5	5	5	4	36
5	4	4	5	4	4	5	4	35
4	4	4	5	4	5	4	5	35
4	5	5	5	5	5	4	4	37
4	4	4	5	4	5	4	4	34
5	4	5	5	4	5	4	4	36
5	4	4	5	4	5	5	4	36
4	5	4	5	4	4	4	4	34
4	5	5	5	4	5	5	4	37
4	4	5	5	4	4	4	4	34
4	4	5	5	4	4	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	5	4	4	5	4	4	34
4	4	5	4	4	4	4	4	33

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas pada Pilot Test

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Kompetensi Aparatur
X1.1	Pearson Correlation	1	.353	.500*	.562**	.438	.180	.783**
	Sig. (2-tailed)		.127	.025	.010	.054	.447	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
X1.2	Pearson Correlation	.353	1	.518*	.106	.274	.526*	.688**
	Sig. (2-tailed)	.127		.019	.658	.243	.017	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20
X1.3	Pearson Correlation	.500*	.518*	1	.218	.203	.588**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.025	.019		.356	.391	.006	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
X1.4	Pearson Correlation	.562**	.106	.218	1	.153	.038	.544*
	Sig. (2-tailed)	.010	.658	.356		.518	.875	.013
	N	20	20	20	20	20	20	20
X1.5	Pearson Correlation	.438	.274	.203	.153	1	.255	.591**
	Sig. (2-tailed)	.054	.243	.391	.518		.279	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20
X1.6	Pearson Correlation	.180	.526*	.588**	.038	.255	1	.605**
	Sig. (2-tailed)	.447	.017	.006	.875	.279		.005
	N	20	20	20	20	20	20	20
Kompetensi Aparatur	Pearson Correlation	.783**	.688**	.759**	.544*	.591**	.605**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.013	.006	.005	
	N	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Akuntabilitas
X2.1	Pearson Correlation	1	.939**	.755**	.559*	.226	.301	.803**	.299	.867**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.010	.338	.197	.000	.201	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.2	Pearson Correlation	.939**	1	.655**	.357	.366	.281	.776**	.212	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.122	.112	.229	.000	.370	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.3	Pearson Correlation	.755**	.655**	1	.466*	.047	.383	.724**	.299	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002		.039	.844	.095	.000	.200	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.4	Pearson Correlation	.559*	.357	.466*	1	.010	.321	.385	.314	.577**
	Sig. (2-tailed)	.010	.122	.039		.967	.167	.093	.178	.008
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.5	Pearson Correlation	.226	.366	.047	.010	1	.563**	.439	.330	.532*
	Sig. (2-tailed)	.338	.112	.844	.967		.010	.053	.156	.016
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.6	Pearson Correlation	.301	.281	.383	.321	.563**	1	.590**	.689**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.197	.229	.095	.167	.010		.006	.001	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.7	Pearson Correlation	.803**	.776**	.724**	.385	.439	.590**	1	.450*	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.093	.053	.006		.046	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.8	Pearson Correlation	.299	.212	.299	.314	.330	.689**	.450*	1	.595**
	Sig. (2-tailed)	.201	.370	.200	.178	.156	.001	.046		.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.867**	.826**	.751**	.577**	.532*	.691**	.903**	.595**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.008	.016	.001	.000	.006	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Sistem Pengendalian Internal
X3.1	Pearson Correlation	1	.710**	.346	.175	.626**	.327	.392	.231	.585**	.714**
	Sig. (2-tailed)		.000	.135	.461	.003	.160	.087	.328	.007	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.2	Pearson Correlation	.710**	1	.279	.106	.602**	.511*	.443	.158	.374	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000		.234	.655	.005	.021	.051	.506	.105	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.3	Pearson Correlation	.346	.279	1	.523*	.738**	.308	.311	.008	.508*	.641**
	Sig. (2-tailed)	.135	.234		.018	.000	.187	.183	.974	.022	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.4	Pearson Correlation	.175	.106	.523*	1	.435	.465*	.594**	.394	.460*	.668**
	Sig. (2-tailed)	.461	.655	.018		.055	.039	.006	.086	.041	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.5	Pearson Correlation	.626**	.602**	.738**	.435	1	.469*	.469*	.270	.512*	.832**
	Sig. (2-tailed)	.003	.005	.000	.055		.037	.037	.250	.021	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.6	Pearson Correlation	.327	.511*	.308	.465*	.469*	1	.640**	.200	.491*	.684**
	Sig. (2-tailed)	.160	.021	.187	.039	.037		.002	.398	.028	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.7	Pearson Correlation	.392	.443	.311	.594**	.469*	.640*	1	.189	.759**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.087	.051	.183	.006	.037	.002		.425	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.8	Pearson Correlation	.231	.158	.008	.394	.270	.200	.189	1	.190	.476*
	Sig. (2-tailed)	.328	.506	.974	.086	.250	.398	.425		.423	.034
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.9	Pearson Correlation	.585**	.374	.508*	.460*	.512*	.491*	.759**	.190	1	.771**
	Sig. (2-tailed)	.007	.105	.022	.041	.021	.028	.000	.423		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Sistem Pengendalian Internal	Pearson Correlation	.714**	.666**	.641**	.668**	.832**	.684*	.746**	.476*	.771**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.002	.001	.000	.001	.000	.034	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Pencegahan Fraud
Y.1	Pearson Correlation	1	.677**	.181	.455*	.266	.521*	.096	.083	.551*
	Sig. (2-tailed)		.001	.446	.044	.257	.019	.686	.729	.012
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.2	Pearson Correlation	.677**	1	.323	.594**	.475*	.637**	.459*	.516*	.790**
	Sig. (2-tailed)	.001		.165	.006	.034	.003	.042	.020	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.3	Pearson Correlation	.181	.323	1	.541*	.689**	.259	.494*	.666**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.446	.165		.014	.001	.269	.027	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.4	Pearson Correlation	.455*	.594**	.541*	1	.634**	.390	.393	.526*	.773**
	Sig. (2-tailed)	.044	.006	.014		.003	.089	.087	.017	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.5	Pearson Correlation	.266	.475*	.689**	.634**	1	.322	.445*	.682**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.257	.034	.001	.003		.166	.049	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.6	Pearson Correlation	.521*	.637**	.259	.390	.322	1	.638**	.267	.664**
	Sig. (2-tailed)	.019	.003	.269	.089	.166		.002	.256	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.7	Pearson Correlation	.096	.459*	.494*	.393	.445*	.638**	1	.406	.672**
	Sig. (2-tailed)	.686	.042	.027	.087	.049	.002		.076	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.8	Pearson Correlation	.083	.516*	.666**	.526*	.682**	.267	.406	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.729	.020	.001	.017	.001	.256	.076		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pencegahan Fraud	Pearson Correlation	.551*	.790**	.752**	.773**	.813**	.664**	.672**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.000	.000	.000	.001	.001	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	48	4	5	4.79	.410
X1.2	48	4	5	4.56	.501
X1.3	48	4	5	4.69	.468
X1.4	48	4	5	4.79	.410
X1.5	48	3	5	4.35	.526
X1.6	48	4	5	4.77	.425
Kompetensi Aparatur	48	23	30	27.96	1.989
Valid N (listwise)	48				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	48	4	5	4.73	.449
X2.2	48	4	5	4.52	.505
X2.3	48	4	5	4.42	.498
X2.4	48	4	5	4.50	.505
X2.5	48	4	5	4.31	.468
X2.6	48	4	5	4.48	.505
X2.7	48	4	5	4.52	.505
X2.8	48	3	5	4.21	.459
Akuntabilitas	48	32	40	35.69	2.280
Valid N (listwise)	48				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	48	4	5	4.46	.504
X3.2	48	4	5	4.08	.279
X3.3	48	3	5	3.90	.371
X3.4	48	3	4	3.85	.357
X3.5	48	3	5	3.67	.519
X3.6	48	4	5	4.25	.438
X3.7	48	3	5	3.90	.371
X3.8	48	3	5	3.96	.355
X3.9	48	3	5	3.73	.536

Sistem Pengendalian Internal	48	32	41	35.79	2.021
Valid N (listwise)	48				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	48	4	5	4.46	.504
Y.2	48	3	5	4.38	.531
Y.3	48	3	5	4.38	.640
Y.4	48	4	5	4.63	.489
Y.5	48	3	5	4.10	.555
Y.6	48	4	5	4.63	.489
Y.7	48	3	5	4.21	.582
Y.8	48	3	5	4.13	.531
Pencegahan <i>Fraud</i>	48	29	40	34.90	2.603
Valid N (listwise)	48				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur	48	23	30	27.96	1.989
Akuntabilitas	48	32	40	35.69	2.280
Sistem Pengendalian Internal	48	32	41	35.79	2.021
Pencegahan <i>Fraud</i>	48	29	40	34.90	2.603
Valid N (listwise)	48				

Lampiran 7 Uji Kualitas Data

A. Validitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Kompetensi Aparatur
X1.1	Pearson Correlation	1	.375**	.318*	.242	.448**	.086	.563**
	Sig. (2-tailed)		.009	.028	.097	.001	.559	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48
X1.2	Pearson Correlation	.375**	1	.493**	.375**	.520**	.418**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.009		.000	.009	.000	.003	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48
X1.3	Pearson Correlation	.318*	.493**	1	.650**	.459**	.595**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.028	.000		.000	.001	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48
X1.4	Pearson Correlation	.242	.375**	.650**	1	.448**	.575**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.097	.009	.000		.001	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48
X1.5	Pearson Correlation	.448**	.520**	.459**	.448**	1	.371**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.001		.009	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48
X1.6	Pearson Correlation	.086	.418**	.595**	.575**	.371**	1	.694**
	Sig. (2-tailed)	.559	.003	.000	.000	.009		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48
Kompetensi Aparatur	Pearson Correlation	.563**	.750**	.808**	.745**	.768**	.694**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Akuntabilitas
X2.1	Pearson Correlation	1	.448*	.230	.141	.006	.303*	.260	.176	.539**
	Sig. (2-tailed)		.001	.116	.340	.966	.036	.074	.231	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.2	Pearson Correlation	.448*	1	.219	.209	.107	-.082	.249	.348*	.533**
	Sig. (2-tailed)	.001		.136	.155	.470	.581	.088	.015	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.3	Pearson Correlation	.230	.219	1	.338*	.251	.543*	.219	.263	.660**
	Sig. (2-tailed)	.116	.136		.019	.086	.000	.136	.070	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.4	Pearson Correlation	.141	.209	.338*	1	.225	.375*	.375*	.183	.619**
	Sig. (2-tailed)	.340	.155	.019		.125	.009	.009	.212	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.5	Pearson Correlation	.006	.107	.251	.225	1	.073	.197	.284	.452**
	Sig. (2-tailed)	.966	.470	.086	.125		.621	.180	.050	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.6	Pearson Correlation	.303*	-.082	.543*	.375*	.073	1	.419*	.111	.595**
	Sig. (2-tailed)	.036	.581	.000	.009	.621		.003	.453	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.7	Pearson Correlation	.260	.249	.219	.375*	.197	.419*	1	.440*	.680**
	Sig. (2-tailed)	.074	.088	.136	.009	.180	.003		.002	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.8	Pearson Correlation	.176	.348*	.263	.183	.284	.111	.440*	1	.592**
	Sig. (2-tailed)	.231	.015	.070	.212	.050	.453	.002		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.539*	.533*	.660*	.619*	.452*	.595*	.680*	.592*	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Sistem Pengendalian Internal
X3.1	Pearson Correlation	1	.328*	.261	.262	.353*	.338*	.147	.228	.233	.681**
	Sig. (2-tailed)		.023	.073	.072	.014	.019	.319	.119	.110	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.2	Pearson Correlation	.328*	1	.085	.125	.196	.000	.085	.036	.154	.371**
	Sig. (2-tailed)	.023		.563	.399	.183	1.000	.563	.809	.296	.009
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.3	Pearson Correlation	.261	.085	1	-.117	.478*	.295*	-.080	-.034	.283	.481**
	Sig. (2-tailed)	.073	.563		.428	.001	.042	.587	.820	.051	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.4	Pearson Correlation	.262	.125	-.117	1	.421*	.239	.044	.287*	.012	.459**
	Sig. (2-tailed)	.072	.399	.428		.003	.102	.769	.048	.938	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.5	Pearson Correlation	.353*	.196	.478*	.421*	1	.375*	.037	.270	.051	.683**
	Sig. (2-tailed)	.014	.183	.001	.003		.009	.804	.064	.731	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.6	Pearson Correlation	.338*	.000	.295*	.239	.375*	1	.295*	.206	.113	.614**
	Sig. (2-tailed)	.019	1.000	.042	.102	.009		.042	.161	.442	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.7	Pearson Correlation	.147	.085	-.080	.044	.037	.295*	1	.289*	.390*	.453**
	Sig. (2-tailed)	.319	.563	.587	.769	.804	.042		.046	.006	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

X3.8	Pearson Correlation	.228	.036	-	.287*	.270	.206	.289*	1	.051	.462**
	Sig. (2-tailed)	.119	.809	.820	.048	.064	.161	.046		.729	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.9	Pearson Correlation	.233	.154	.283	.012	.051	.113	.390*	.051	1	.517**
	Sig. (2-tailed)	.110	.296	.051	.938	.731	.442	.006	.729		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Sistem Pengeandalian Internal	Pearson Correlation	.681*	.371*	.481*	.459*	.683*	.614*	.453*	.462*	.517*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.001	.001	.000	.000	.001	.001	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Pencegahan <i>Fraud</i>
Y.1	Pearson Correlation	1	.139	.314*	.194	.130	.453**	.393**	.179	.573**
	Sig. (2-tailed)		.345	.030	.186	.378	.001	.006	.223	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.2	Pearson Correlation	.139	1	.329*	.061	.298*	.061	.362*	.434**	.568**
	Sig. (2-tailed)	.345		.023	.678	.040	.678	.012	.002	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.3	Pearson Correlation	.314*	.329*	1	.255	.307*	.391**	.357*	.360*	.714**
	Sig. (2-tailed)	.030	.023		.080	.034	.006	.013	.012	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.4	Pearson Correlation	.194	.061	.255	1	.304*	.111	.206	.184	.470**
	Sig. (2-tailed)									
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48

	Sig. (2-tailed)	.186	.678	.080		.036	.452	.161	.210		.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.5	Pearson Correlation	.130	.298*	.307*	.304*	1	.147	.195	.388**		.582**
	Sig. (2-tailed)	.378	.040	.034	.036		.319	.184	.006		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.6	Pearson Correlation	.453**	.061	.391**	.111	.147	1	.280	.266		.553**
	Sig. (2-tailed)	.001	.678	.006	.452	.319		.054	.067		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.7	Pearson Correlation	.393**	.362*	.357*	.206	.195	.280	1	.327*		.661**
	Sig. (2-tailed)	.006	.012	.013	.161	.184	.054		.023		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.8	Pearson Correlation	.179	.434**	.360*	.184	.388**	.266	.327*	1		.656**
	Sig. (2-tailed)	.223	.002	.012	.210	.006	.067	.023			.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Pencegahan <i>Fraud</i>	Pearson Correlation	.573**	.568**	.714**	.470**	.582**	.553**	.661**	.656**		1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000		
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.816	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.79	.410	48
X1.2	4.56	.501	48
X1.3	4.69	.468	48
X1.4	4.79	.410	48
X1.5	4.35	.526	48
X1.6	4.77	.425	48

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	23.17	3.206	.396	.823
X1.2	23.40	2.712	.601	.783
X1.3	23.27	2.670	.697	.761
X1.4	23.17	2.908	.628	.779
X1.5	23.60	2.627	.618	.780
X1.6	23.19	2.964	.555	.793

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.725	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.73	.449	48
X2.2	4.52	.505	48
X2.3	4.42	.498	48
X2.4	4.50	.505	48
X2.5	4.31	.468	48
X2.6	4.48	.505	48
X2.7	4.52	.505	48
X2.8	4.21	.459	48

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	30.96	4.296	.376	.705
X2.2	31.17	4.227	.345	.713
X2.3	31.27	3.946	.507	.678
X2.4	31.19	4.028	.451	.690
X2.5	31.38	4.452	.266	.726
X2.6	31.21	4.083	.421	.697
X2.7	31.17	3.887	.531	.673
X2.8	31.48	4.170	.436	.694

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.682	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3.1	4.46	.504	48
X3.2	4.08	.279	48
X3.3	3.90	.371	48
X3.4	3.85	.357	48
X3.5	3.67	.519	48
X3.6	4.25	.438	48
X3.7	3.90	.371	48
X3.8	3.96	.355	48
X3.9	3.73	.536	48

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	31.33	2.950	.508	.618
X3.2	31.71	3.743	.243	.676
X3.3	31.90	3.500	.321	.663
X3.4	31.94	3.549	.303	.666
X3.5	32.13	2.920	.504	.619
X3.6	31.54	3.190	.449	.635
X3.7	31.90	3.542	.289	.668

X3.8	31.83	3.546	.308	.665
X3.9	32.06	3.251	.282	.678

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y.1	4.46	.504	48
Y.2	4.38	.531	48
Y.3	4.38	.640	48
Y.4	4.63	.489	48
Y.5	4.10	.555	48
Y.6	4.63	.489	48
Y.7	4.21	.582	48
Y.8	4.13	.531	48

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	30.44	5.528	.420	.724
Y.2	30.52	5.489	.404	.727
Y.3	30.52	4.808	.555	.695
Y.4	30.27	5.819	.304	.743
Y.5	30.79	5.402	.413	.725

Y.6	30.27	5.606	.402	.727
Y.7	30.69	5.113	.503	.707
Y.8	30.77	5.244	.514	.706

Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik

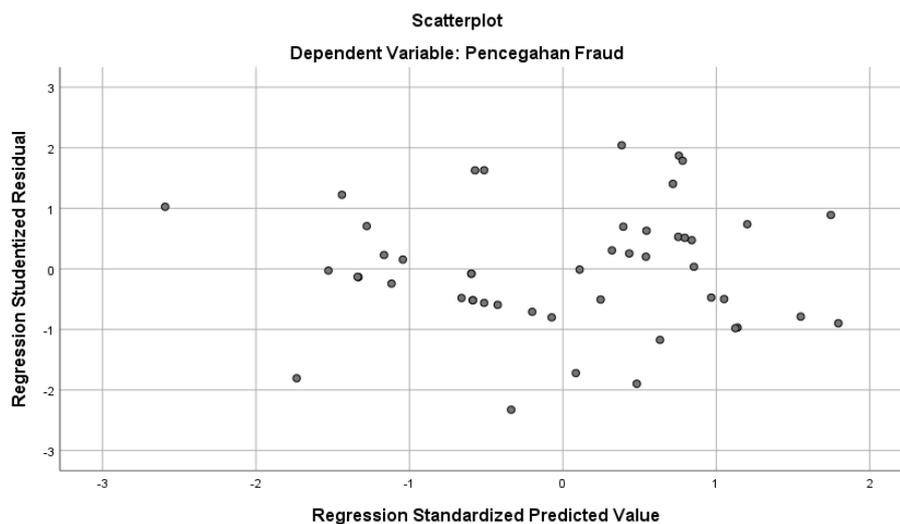
A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.31151312
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.060
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

B. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Aparatur	.846	1.182
	Akuntabilitas	.814	1.228
	Sistem Pengendalian Internal	.722	1.385
a. Dependent Variabel: Pencegahan <i>Fraud</i>			

C. Uji Heterokedastisitas



Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12.028	4.005		-3.003	.004
	Kompetensi Aparatur	.091	.103	.127	.876	.386
	Akuntabilitas	.156	.092	.252	1.701	.096
	Sistem Pengendalian Internal	.160	.110	.228	1.450	.154

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 9 Uji Hipotesis

A. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.581	7.377		3.874	.000
	Kompetensi Aparatur	.341	.190	.260	1.788	.081
	Akuntabilitas	.446	.169	.391	2.632	.012
	Sistem Pengendalian Internal	-.534	.203	-.415	-2.631	.012

a. Dependent Variabel: Pencegahan *Fraud*

B. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.581	7.377		3.874	.000
	Kompetensi Aparatur	.341	.190	.260	1.788	.081
	Akuntabilitas	.446	.169	.391	2.632	.012
	Sistem Pengendalian Internal	-.534	.203	-.415	-2.631	.012

a. Dependent Variabel: Pencegahan *Fraud*

C. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67.354	3	22.451	3.934	.014 ^b
	Residual	251.125	44	5.707		
	Total	318.479	47			

a. Dependent Variabel: Pencegahan *Fraud*

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas

D. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.211	.158	2.389
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas				
b. Dependent Variabel: Pencegahan <i>Fraud</i>				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Iqbal Fakhoironi Panggilan Iqbal, lahir di Pati pada tanggal 17 Mei 2001 dari pasangan suami Bapak Ah. Sholeh dan Ibu Maryatun. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Dk. Lembur, RT.06/RW.03, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh peneliti yaitu di MI Al-Hidayah Sunan Prawoto, lulus pada tahun 2013, MTs Sunan Prawoto lulus pada tahun 2016, MA Sunan Prawoto lulus tahun 2019 dan mulai tahun 2019 mengikuti Program Studi S1 Akuntansi Syariah di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.